

**TESIS**

**PERSIAPAN PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN DALAM  
MENGHADAPI PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Magister Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik*

Oleh :

**AHMAD NUR ANSARI**

**E052202002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**PERSIAPA PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN DALAM  
MENGHADAPI PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024**

Disusun dan diajukan oleh


**AHMAD NUR ANSARI**

E052202002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **26 Juni 2023**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



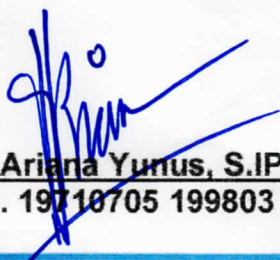
**Prof. Dr. Muhammad, M.Si.**  
NIP. 19710917 199703 1001

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si**  
NIP. 19730813 199802 2001

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,



**Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19710705 199803 2002.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**  
NIP. 196511091991031008

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD NUR ANSARI  
NIM : E052202002  
Program Studi : Magister Ilmu Politik  
Jenjang : Strata 2 (S2)

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **Persiapan Partai Golkar Sulawesi Selatan Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif Tahun 2024.**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Tesis karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 26 Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



AHMAD NUR ANSARI

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis hingga saat ini diberikan kesehatan serta dapat menyelesaikan karya ilmiah tesis ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta, yaitu Ibu **Hj. Andi Intang** dan Ayah penulis **H. Abdul Wahab, S.Pd** yang selalu memberikan dukungan serta iringan doa siang dan malam yang tiada hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama ini, sehingga menjadi alasan utama tesis ini bisa dan harus diselesaikan. Kepada keluarga tercinta **Ahmad Febriansyah dan Rifdah Mufiidah Rusli, S.KM., M.Kes** yang tidak pernah putus memberikan keceriaan, doa, serta dukungan baik secara moril maupun material, beserta seluruh keluarga besar yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih semua atas dorongan, motivasi, perhatian, dukungan, dan doa di saat susah dan senang kepada penulis selama ini.

Terima kasih tak terlupa dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua pembimbing penulis yang telah mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, yakni **Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si** selaku pembimbing utama, yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini. **Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si** selaku penasehat pembimbing pendamping, yang telah banyak

membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan tesis ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. **Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si** selaku Ketua Program Studi Megister Ilmu Politik FISIP Unhas.
4. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin baik selama penulis mengikuti perkuliahan di S1 maupun S2 ini, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Ummi Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Zulhajar, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP, M.Si** Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan

sebaik mungkin.

5. Seluruh Staf khususnya Departemen Ilmu Politik, serta staf administrasi Pascasarjana di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagipenulis selama ini.
6. Terima kasih kepada para informan semua informan yang terlibat pada penelitian ini khususnya Ibu Andi Ina Kartikasari, selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus Bendahara Umum DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Bapak La Kama Wiyaka, Ketua Bappilu DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Bapak Rahman Pina, selaku Ketua AMPG Sulawesi Selatan sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Fahrudin Rangga, selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD I Partai Golkar Sulsel sekaligus Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Bapak Abbas Hady, selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan untuk menunjang Tesis ini, memberikan banyak bantuan dan kemudahan kepada penulis.
7. **Keluarga Besar Magister Ilmu Politik Angkatan 2020**, Ray Suryadi, Nurlira Goncing, Muh. Syafi'l Syahrir, Rury Ramadhan, Amalia, Muhammad Gaus, Galank Pratama, Muh. Fichriyadi Hastira, Andi Ulfatul Zahra, Kurnia Sulistiani, terimakasih atas dukungan dan dorongannya selama perkuliahan. Tanpa kalian, penulis tidak akan

bisa seperti ini. Terima kasih.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini. Sekian dan terima kasih.

**Makassar, 23 Juni 2023**

**AHMAD NUR ANSARI**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Kerangka Teori.....	10
2.1.1 Pendekatan Institusionalisme .....	10
2.1.2 Institusionalisme Partai .....	12
2.2 Penelitian Terdahulu.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran .....	28
2.4 Skema Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian .....	35
3.2 Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian .....	35
3.3 Jenis Data Penelitian.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Partai Golkar .....	41
4.2 Gambaran Umum DPD I Partai Golkar Sulsel .....	49



<b>BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
5.1 Dimensi Systemnes Partai Golkar Sulsel.....	50
5.2 Dimensi Reification Partai Golkar Sulsel.....	63
5.3 Implikasi Teoritik.....	74
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
6.1 Kesimpulan .....	82
6.2 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

## ABSTRAK

**Ahmad Nur Ansari. NIM E052202002. Persiapan Partai Golkar Sulawesi Selatan Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif Tahun 2024.** Di bawah bimbingan Bapak Muhammad dan Ibu Gustiana A. Kambo.

Partai politik sangat menentukan keberlangsungan sistem demokrasi di sebuah negara, tanpa adanya partai politik demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Seluruh partai politik memerlukan institusionalisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dari partai tersebut dalam menghadapi pemilu, sebab partai politik dituntut untuk senantiasa menjaga dan memelihara stabilitas organisasinya melalui pembenahan secara internal maupun eksternal. Dengan kondisi ini, sistem pelembagaan partai politik yang mapan menjadi penting dalam upaya untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu. DPD I Partai Golkar Sulsel merupakan partai pemenang pemilu di Sulsel, hal ini tentu saja tidak terlepas dari institusionalisasi partai yang mapan setiap kali menghadapi pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulsel dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini melibatkan para fungsionaris DPD I Partai Golkar Sulsel sebagai sumber informasi untuk menarik kesimpulan secara komprehensif. Selain itu, berbagai cara pengumpulan data yang dilakukan diantaranya adalah wawancara mendalam dan dokumentasi dengan telaah mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun pendekatan dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan institusionalisme, dan konsep institusionalisasi partai.

Hasil penelitian ditemukan upaya persiapan DPD I Partai Golkar Sulsel dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024 dari segi institusionalisasi partai yang dapat dilihat melalui dua dimensi. Pertama dimensi kesisteman, DPD I Partai Golkar Sulsel memperkuat kaderisasi dan menggunakan sehubungan kader untuk membantu kemenangan Pemilu tahun 2024 mendatang melalui pembentukan kelembagaan partai secara struktural. Untuk menghindari konflik internal DPD I Partai Golkar Sulsel lebih mengedepankan proses musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kedua dimensi Reifikasi, untuk mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat, DPD I Partai Golkar Sulsel memperkuat citra politiknya dengan melaksanakan kegiatan sosial dan kemanusiaan serta rekrutmen dan pendidikan politik di masyarakat dengan program Yellow Clinic, Golkar Milenial dan Golkar Institute.

**Kata Kunci :** Partai Golkar, Institusionalisasi Partai, Pemilihan Umum.

## **ABSTRACT**

**Ahmad Nur Ansari. NIM E052202002. Preparation of the South Sulawesi Golkar Party in Facing the 2024 Legislative Elections. Under the guidance of Mr. Muhammad and Mrs. Gustiana A. Kambo.**

*Political parties greatly determine the sustainability of the democratic system in a country, without political parties democracy will not run well. All political parties need institutionalization to improve the party's organizational performance in facing elections, because political parties are required to always maintain and maintain organizational stability through internal and external improvements. Under these conditions, an established institutional system of political parties is important in efforts to win the competition in elections. DPD I Golkar Party in South Sulawesi is the winning party in the election in South Sulawesi, this is of course inseparable from the established institutionalization of the party every time it faces an election.*

*This study aims to find out how the institutionalization of the DPD I Golkar Party in South Sulawesi faces the 2024 legislative elections. The author uses a qualitative descriptive research method. This research involved DPD I functionaries of the South Sulawesi Golkar Party as a source of information to draw comprehensive conclusions. In addition, various methods of data collection were carried out including in-depth interviews and documentation with an in-depth study of matters relating to this research problem. The approaches and concepts used in this study are the institutionalism approach, and the concept of party institutionalization.*

*The results of the study found that efforts to prepare DPD I for the Golkar Party in South Sulawesi in facing the 2024 legislative elections in terms of party institutionalization can be seen through two dimensions. First, the systemic dimension, the DPD I Golkar Party of South Sulawesi strengthens cadres and uses all cadres to help win the upcoming 2024 elections through the structural formation of party institutions. To avoid internal conflicts, DPD I Golkar Party of South Sulawesi prioritizes the deliberation process in decision making. The two dimensions of Reification, to gain support and sympathy from the people, DPD I Golkar Party of South Sulawesi strengthened its political image by carrying out social and humanitarian activities as well as recruitment and political education in the community with the Yellow Clinic, Millennial Golkar and Golkar Institute programs.*

**Keywords:** Golkar Party, Party Institutionalization, General Election.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Partai politik sangat menentukan keberlangsungan sistem demokrasi di sebuah negara, tanpa adanya partai politik demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Ini dikarenakan partai politik merupakan suprastruktur yang harus dimiliki sebuah sistem pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang demokratis.<sup>1</sup>

Partai politik sebagai bagian dari suprastruktur politik berperan menyeimbangkan serta mengontrol kinerja pemerintah agar terjadi keseimbangan dalam jalannya sistem politik. Partai politik itu sendiri merupakan organisasi yang bersifat dinamis, partai politik mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui proses yang panjang. Huntington mengungkapkan bahwa partai politik itu tumbuh dan berkembang melalui setidaknya empat tahapan penting, yakni faksionalisme, polarisasi, ekspansi, dan institusionalisasi.<sup>2</sup> Berdasarkan keempat tahapan perkembangan ini ia memosisikan pelembagaan sebagai tingkatan tertinggi dalam fase pertumbuhan dan perkembangan partai politik. Hal inilah yang menjadikan pentingnya tingkat pelembagaan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridha T.R, Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan, *Cosmogov Vol.2 No.1*, April 2016.

<sup>2</sup> Huntington dalam Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2011

bagi sebuah partai politik di negara demokrasi seperti Indonesia.

Indonesia sampai saat ini masih berada dalam tahap transisi menuju konsolidasi demokrasi. Proses transisi ini nampaknya akan berjalan lebih lama dari perkiraan sebelumnya, karena lemahnya komponen-komponen yang bisa menjamin terselenggaranya sistem yang demokratis. Salah satu komponen tersebut adalah partai politik. Kurang berfungsinya serta proses institusionalisasi partai politik yang belum maksimal di Indonesia merupakan permasalahan umum dalam era transisi demokrasi. Permasalahan ini masih harus ditambah dengan permasalahan konsolidasi internal partai, sehingga demokrasi yang diharapkan akan semakin sulit dicapai. Permasalahan konsolidasi internal partai banyak terlihat dari timbulnya konflik-konflik internal yang berimplikasi langsung terhadap kekuatan partai politik secara institusi.<sup>3</sup>

Partai politik yang tidak mampu mengimplementasikan segala peran dan fungsinya dalam realitas politik menjadi hal yang memperpanjang catatan buruk bagi partai politik itu sendiri. Institusionalisasi partai tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena terdapat kelemahan-kelemahan internal dan eksternal partai. Kemampuan eksternal dari partai politik yang belum berjalan fungsional secara baik, ditambah konflik internal organisasi yang semakin mengemuka sehingga menenggelamkan peran partai politik secara institusi. Salah satu masalah

---

<sup>3</sup> Gustiana Kambo, Dimensi Proses Pelembagaan Partai Politik (Studi tentang Kelembagaan Partai Golkar di Provinsi Sulawesi Selatan), Makassar: Journal of Society and Governance, 2017

serius yang dihadapi partai-partai di Indonesia saat ini adalah tidak adanya institusionalisasi dalam tubuh partai secara menyeluruh. Partai seakan-akan hanya menjalankan aktivitasnya menjelang pemilu. Setelah itu, masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan partai politik.

Partai politik dan demokrasi memiliki kaitan yang sangat erat. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Karenanya, derajat kualitas demokrasi, salah satunya ditentukan oleh derajat kualitas partai politik di dalamnya. Kualitas partai politik berelasi kuat dengan proses pelebagaan. Dalam konteks itu, upaya untuk meninjau proses pelebagaan partai politik adalah bagian dari upaya memastikan demokrasi diisi oleh partai politik yang berkualitas.<sup>4</sup> Fakta melemahnya pelebagaan partai politik secara khusus, dan sistem kepartaian secara umum, dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya daya survivalitas banyak partai politik. Sebagaimana yang dikatakan Huntington, dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai politik yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas partai dalam sistem kepartaian yang berlangsung.<sup>5</sup>

Realitas politik pada era reformasi menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan (kredibilitas) masyarakat terhadap partai politik secara massif. Hal ini dikarenakan partai politik tidak mampu memainkan fungsinya secara optimal. Partai-partai politik tidak memiliki kemampuan

---

<sup>4</sup> Randall, Vicky dan Lars, Svasand. (2002). *Party Institutionalisation in New Democracies*. Party Politics. London: SAGE Publication

<sup>5</sup> Huntington, S. (1968). *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press

mengerahkan dan mewakili kepentingan warga negara maupun menghubungkan warga negara dengan pemerintah. Sehingga bukannya menjadi institusi yang mengantar masyarakat kepada kehidupan yang lebih demokratis, partai politik malah berubah menjadi sebuah institusi yang hanya mengejar kepentingan sendiri dan melupakan hakikat keberadaannya dalam sistem politik. Proses institusionalisasi yang kurang baik, manajemen internal yang rendah dan kurang dikelola secara demokratis mengakibatkan partai politik belum dapat menjadi institusi publik yang mampu menggerakkan kader secara massif untuk menerima kedaulatan institusi organisasi. Tentunya praktik ini hampir menjangkiti sebagian besar partai di Indonesia baik di tingkatan pusat maupun daerah.<sup>6</sup>

Secara umum pelembagaan partai politik merujuk pada sejauh mana sebuah partai mampu mencapai kematangan secara internal dan eksternal sebagai sebuah organisasi demokratis. Sehingga sebuah partai politik mampu bertahan ditengah persaingan politik kontemporer haruslah memiliki tingkat pelembagaan yang baik. Tingginya tingkat persaingan antar partai bukanlah satu-satunya rintangan yang dihadapi partai politik pasca Reformasi, terdapat masalah lain yakni menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Banyaknya tantangan yang dihadapi menuntut partai politik harus mampu bertahan dengan menerapkan berbagai strategi agar tetap memperoleh tempat dihati

---

<sup>6</sup> Lili Romli pada Seminar dan Lokakarya "Penguatan Kelembagaan Partai Politik sebagai Pilar Demokrasi", UGM Yogyakarta, 2012.

masyarakat konstituen mereka, salah satunya yakni dengan meningkatkan pelembagaan partai. Bagi partai politik yang mampu beradaptasi maka akan terus tumbuh dan berkembang, sebaliknya partai yang tidak mampu mengimbangi persaingan politik yang ada pada akhirnya akan hilang terseleksi persaingan yang semakin ketat.<sup>7</sup>

Partai politik memerlukan institusionalisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dari partai tersebut. Hal ini mampu menunjang kehadiran proses yang lebih demokratis di dalam aktivitasnya. Pembinaan pada partai politik menjadi aspek yang mutlak dilakukan pada era demokratisasi. Selain karena partai politik memiliki peranan yang sangat vital sebagai penggerak arus demokrasi, juga derajat fungsinya sangat mempengaruhi aktivitas tatanan kelembagaan dalam sebuah negara.<sup>8</sup>

Partai Golkar sebagai salah satu partai peserta pemilu tahun 2024 harus memperhatikan institusionalisasi partainya dalam menghadapi pemilu khususnya pemilihan legislatif, sebab partai politik dituntut untuk senantiasa menjaga dan memelihara stabilitas organisasinya, melalui pembenahan secara internal maupun eksternal. Dengan kondisi ini, sistem pelembagaan partai politik yang mapan menjadi penting dalam upaya untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu, ketika partai politik

---

<sup>7</sup> Nurlatipah Nasir, Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik DI Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik dengan Konstituen, *Jurnal Politik Proferik Vol. 04 No. 1* Tahun 2016, hlm. 3.

<sup>8</sup> Andi Rahmat Hidayat "Institusionalisasi Partai politik (Studi tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan pada Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang Tahun 2013), UNHAS Makassar. 2013.



telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik. Institusionalisasi Partai Golkar tidak hanya dilakukan di tingkat pusat seperti di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) saja tetapi harus dilakukan secara menyeluruh ke tingkat daerah seperti Dewan Pimpinan Daerah (DPD), salah satunya DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Partai Golkar melalui rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang dilaksanakan di Makassar menekankan pentingnya pelembagaan atau institusionalisasi partai dalam dimensi kesisteman hal itu disampaikan langsung oleh ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam sambutannya bahwa langkah persiapan yang utama dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang adalah konsolidasi internal Partai Golkar untuk memperkuat pelembagaan atau institusionalisasi partai. Hal ini sejalan dengan perkataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung bahwa strategi Partai Golkar Memenangkan Pemilu 2024 yaitu dengan mengurangi konflik internal partai. Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid juga mendorong adanya konsolidasi secara menyeluruh di tubuh DPD I Partai Golkar Sulsel, terlebih pemilu 2024 sudah di depan mata, dimana partai politik lain sudah bergerak dan bermanuver untuk merebut posisi Partai Golkar melihat ketatnya peta persaingan politik di Sulawesi Selatan.

Partai Golkar Sulawesi Selatan dibawah komando Taufan Pawe

telah menyelesaikan konsolidasi 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, sejauh ini 24 Kabupaten/Kota sudah menggelar musyawarah daerah memilih ketua baru definitif, 7 diantaranya dipimpin oleh kepala daerah kader Golkar. Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe menargetkan Partai Golkar kembali menjadi pemenang pemilu di Sulawesi Selatan. Sebagaimana diketahui bahwa Partai Golkar merupakan partai pemenang pemilu di Sulawesi Selatan selama beberapa periode belakangan ini.

Dalam dimensi pengetahuan publik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengintruksikan seluruh kader Golkar untuk terus bergerak dan turun langsung dalam penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional agar lebih dekat dengan masyarakat.

Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan merespon intruksi dari ketua umum dengan meluncurkan *Yellow Clinic* yang diresmikan bersamaan dengan pelantikan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe di acara ulang tahun Golkar yang ke-57, Taufan Pawe mengatakan *Yellow Clinic* ini bukan sekedar klinik biasa, klinik ini bersifat pratama yang artinya mulai dokter dan perawatnya itu jelas dan bisa bekerja sama dengan BPJS, sehingga klinik ini memang serius melayani masyarakat. Selain *Yellow Clinic* DPD I Partai Golkar

Sulsel telah menggelar sejumlah kegiatan kemanusiaan seperti bantuan UMKM, bantuan bencana alam, bantuan Pendidikan dan Kesehatan, serta vaksinasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif Di Tahun 2024”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi kesisteman dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024?
2. Bagaimana Institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi pengetahuan publik dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana Institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi kesisteman dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi pengetahuan publik dalam menghadapi pemilihan legislatif pada 2024.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis:
  - a. Menjawab fenomena sosial politik yang ada.
  - b. Menunjukkan secara ilmiah bagaimana institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi kesisteman, dan pengetahuan publik dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024.
  - c. Sebagai tambahan literatur dan bahan kajian ilmu politik dalam upaya perkembangan keilmuan khususnya dalam lingkup mahasiswa program studi ilmu politik.
2. Manfaat Praktis:
  - a. Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi gelar megister ilmu politik.
  - b. Sebagai sarana pengembangan khasanah keilmuan bagi penulis secara pribadi.
  - c. Sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan bagi siapa saja yang tertarik untuk meneliti topik penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

- d. Membantu para pelaku politik pada khususnya maupun masyarakat awam pada umumnya untuk memahami institusionalisasi partai politik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini penulis menguraikan beberapa konsep yang mendasari penelitian ini sehingga menjadi landasan penulis dalam memahami tema penelitian tentang persiapan Partai Golkar menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024, adapun beberapa konsep yang digunakan adalah pendekatan institusionalisme dan institusionalisasi partai politik.

#### **2.1. Pendekatan Institusionalisme**

Pendekatan institusional atau sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dengan demikian pendekatan tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional.

Menurut Miriam Budiardjo<sup>9</sup> seandainya kita ingin mempelajari parlemen dengan pendekatan ini maka yang akan dibahas adalah kekuasaan serta wewenang yang dimilikinya seperti tertuang dalam naskah-naskah resmi (undang-undang dasar, undang-undang atau peraturan tata tertib); hubungan formal dengan badan eksekutif; struktur organisasi (pembagian dalam komisi, jenjang-jenjang pembicaraan) atau hasil kerjanya (berapa undang-undang telah dihasilkan).

Para peneliti tradisional tidak mengkaji apakah lembaga itu memang terbentuk dan berfungsi seperti yang dirumuskan dalam naskah-naskah resmi tersebut, apalagi bertanya mengapa ada diskrepansi antara struktur formal dan gejala-gejala yang dapat diamati dalam praktik. Pada saat bersamaan, pendekatan tradisional tidak menghiraukan organisasi-organisasi informal, seperti kelompok kepentingan dan kelompok lainnya, dan juga media komunikasi. Bahasan ini lebih bersifat statis dan deskriptif daripada analitis, dan banyak memakai ulasan sejarah. Lagi pula dalam proses pembahasan, "fakta" (sesuatu yang dapat dibuktikan melalui pengalaman atau pengamatan) kurang dibedakan dengan norma (ideal atau standar yang harus menjadi pedoman untuk perilaku). Yang terjadi, pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif (yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu) dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi Barat. Menurut penglihatan ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal.

---

<sup>9</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 72

Pendekatan Institusional memandang partai politik sebagai lembaga yang memiliki struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan. Teori kelembagaan (Institusional), yang menyatakan bahwa partai politik dibentuk oleh lembaga- lembaga negara baik legislatif maupun eksekutif sebagai kebutuhan para anggotanya untuk mengadakan kontak dan membina dukungan dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak bias dengan kebutuhan, tuntutan, dan harapan publiknya. Sehingga dibuatlah wadah yang mampu menampung aspirasi warga masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah partai politik.

Partai politik adalah organisasi yang mempunyai fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Secara sederhana partai politik merupakan representation of ideas yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokrasi. Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada representation of ideas secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi.

## **2.2. Institusionalisasi Partai Politik**

Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti

warga negara, *politike te ckne* berarti kemahiran politik dan *politike episteme* yang berarti ilmu politik.<sup>10</sup>

*Carl J. Fiedrich* mendefinisikan partai politik sebagai “sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil kepada anggotanya”. Sedangkan menurut *Giovanni Sartori*, partai politik adalah “suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan.

Menurut *Sigmund Neumann* partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan (ideologi) yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik

---

<sup>10</sup> Ellya, Rosana. 2012. “Partai Politik Dan Pembangunan Politik”, Jurnal TAPIs, Vol.8, No.1.



dan merebut kedudukan politik biasanya secara konstitusional (pemilu) untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian partai politik di atas, partai politik pada hakekatnya mempunyai kemampuan penetrasi (penguasaan jabatan publik) tidak hanya dalam konteks orientasi jabatan publik atau yang kemudian disebut *office*, melainkan juga dalam orientasi *to drive public policy*. Untuk itu, secara umum fungsi partai politik adalah representasi (perwakilan), konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen, pemilihan pemimpin, pertimbangan dan perumusan kebijakan, serta kontrol terhadap pemerintah.<sup>12</sup>

Institusionalisasi partai politik adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan value (nilai) dan stability (stabilitas) tertentu. Ketika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik.<sup>13</sup>

Menurut Huntington, institusionalisasi partai politik adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan value (nilai)

---

<sup>11</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm.16

<sup>12</sup> Macridis, Roy C. 1996. "Pengantar, Sejarah, Fungsi, dan Tipologi Partai-Partai", dalam Dr. Ichlasul Amal. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya. Hal. 6.

<sup>13</sup> Primadi, Agam., Purwaningsi, Titin. 2019. "Institusionalisasi Partai Politik dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus: Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)", *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 3, No. 1, Hal. 63-78.

dan stability (stabilitas) tertentu.<sup>14</sup> Ketidakmampuan partai politik untuk mengimplementasikan segala peran dan fungsinya dalam realitas politik menjadi hal yang memperpanjang catatan buruk bagi partai politik itu sendiri. Intitusionalisasi partai tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena terdapat kelemahan-kelemahan internal dan eksternal partai. Kemampuan eksternal dari partai politik yang belum berjalan fungsional secara baik, ditambah konflik internal organisasi yang semakin mengemuka sehingga menenggelamkan peran partai politik secara institusi.

Partai politik yang berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik. Salah satu masalah serius yang dihadapi partai-partai di Indonesia saat ini adalah tidak adanya institusionalisasi dalam tubuh partai secara menyeluruh. Partai seakan-akan hanya menjalankan aktivitasnya menjelang pemilu. Setelah itu, masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan partai.<sup>15</sup>

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa setidaknya-tidaknya ada tiga kelemahan utama partai politik di Indonesia. Pertama, ideologi partai yang tidak operasional sehingga tidak saja sukar mengidentifikasi pola dan arah kebijakan publik, yang diperjuangkannya tetapi juga sukar membedakan

---

<sup>14</sup> Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian ilmu Politik*, Bandung : Alfabeta 2012

<sup>15</sup> Gustiana Kambo, *Dimensi Proses Pelembagaan Partai Politik (Studi tentang Kelembagaan Partai Golkar di Provinsi Sulawesi Selatan)*, Makassar: *Journal of Society and Governance*, 2017

partai yang satu dengan partai yang lain. Kedua, secara internal, organisasi partai kurang dikelola secara demokratis, sehingga partai politik lebih sebagai organisasi pengurus yang bertikai dari pada organisme yang hidup sebagai organisasi anggota. Ketiga, secara eksternal kurang memiliki pola pertanggungjawaban yang jelas terhadap publik.<sup>16</sup>

Institusionalisasi partai politik menurut Guetermo O'Donnell, melibatkan dua aspek penting, yaitu value infusion (nilai pemasukan) dan behavioral routinization (rutinitas perilaku).<sup>17</sup> *Pertama*, value infusion merupakan suatu proses dimana para anggota menggeser fokus dari tujuan-tujuan dan kepentingan individual yang spesifik ke arah tujuan-tujuan besar organisasi partai politik. Dari sini maka partai politik akan dapat mengembangkan legitimasi, penerimaan di masyarakat, dan tentunya mengakarnya partai politik (party rootedness).

*Kedua*, behavioral routinization, hal ini terjadi kalau ada pola-pola organisasi yang stabil, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara formal dan informal tertanam di dalam pola-pola aktivitas partai sehingga akan ada prediktabilitas dan reguritas perilaku dan ekspektasi-ekspektasi dari para anggota, pengurus partai politik, maupun masyarakat luas lainnya. Hal ini tentu tidak akan berlangsung mudah, karena selalu saja ada upaya-upaya pembajakan partai politik oleh segelintir elit maupun oligarki partai untuk kepentingan politik sempit mereka. Terkadang juga partai politik tidak mampu mengelola rutinitas perilaku ini karena

---

<sup>16</sup> Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo, hal. 232

<sup>17</sup> Efriza, Political Explore: Sebuah Kajian ilmu Politik, Bandung : Alfabeta 2012

terciptanya disfungsi faksionalisme (*dysfunctional factionalism*) yang membuat partai politik sulit untuk menjadi aktor politik yang solid dan tunggal akibat pertarungan faksi-faksi yang tajam.

Institusionalisasi partai politik menurut *Vicky Randall dan Lars Svasan* adalah:

“...Proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (*the process by which the party become established in terms of both integrated patterns on behaviour and of attitude and culture*)”.

Proses institusionalisasi ini mengandung dua aspek yaitu aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila kedua aspek ini dipersilangkan maka akan melibatkan setidaknya 4 dimensi penting,<sup>18</sup> sebagai berikut:

#### **a. Dimensi Kesisteman Partai Politik (Systemnes)**

Dimensi kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanismenya yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu.

---

<sup>18</sup> Vicky Randall dan Lars Svasand (2002), *Party Institutionalization in New Democracies, Party Politics*, Vol.8 No.1, Sage Publication, London, hal 5-29

Dimensi kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pemimpin partai yang disegani ataukah pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan; (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (d) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART).

#### **b. Dimensi Identitas Partai Politik (Value Infusion)**

Dimensi Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau platform partai, basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan (a) hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (popular bases), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan

tangible, resources berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai).

Partai politik dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai bila partai itu telah memiliki lapisan sosial atau golongan masyarakat sebagai pendukung loyal (basis sosial) karena pola dan arah kebijakan yang diperjuangkannya dan bila dukungan yang diberikan kepada partai itu bukan semata-mata karena menerima materi tertentu dari partai tetapi karena orientasi politiknya sesuai ideologi atau platform partai itu. Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas. Selain itu karena ideologi partai belum dijabarkan dalam bentuk pola dan arah kebijakan publik yang diperjuangkan, maka perbedaan di antara partai politik itu baru tampak secara simbolis. Karena itu, masih sukar mengategorikan basis sosial pendukung setiap partai politik di Indonesia.

### **c. Dimensi Otonomi Partai Politik (Decisional Autonomy)**

Dimensi otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa: (a) hubungan ketergantungan kepada aktor luar, (b) hubungan bersifat saling tergantung

(interdependen), dan (c) hubungan itu berupa jaringan (linkage) yang memberi dukungan kepada partai.

Partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi otonomi partai bila keputusan partai politik itu tidak didikte pihak luar tetapi diputuskan sendiri dengan atau tanpa konsultasi dengan aktor luar yang menjadi mitra atau jaringan pendukung partai itu. Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan bila dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota, kontribusi pengurus, dan aktivis di luar iuran.

#### **d. Dimensi Pengetahuan Publik Terhadap Partai Politik (Reification)**

Dimensi pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik tersebut. Adapun hal yang menjadi isu utama di sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat. Bila sosok dan kiprah partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai tersebut, maka pihak lain baik individu maupun lembaga di masyarakat akan menyesuaikan aspirasi dan harapannya atau sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut.

Partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik tersebut sesuai identitas nilai (platform) partai itu

sehingga masyarakat pun dapat memahami (meski belum tentu setuju) mengapa suatu partai politik melakukan jenis tindakan tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain. Harus dibedakan secara jelas antara mengetahui sosok dan kiprah suatu partai sesuai yang dimaksudkan partai itu dengan sikap setuju atau tidak setuju terhadap sosok dan kiprah partai tersebut.

Dimensi pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai. Makin tua umur suatu partai politik makin jelas definisi atau pengetahuan publik mengenai partai. Makin luas dan mendalam kiprah suatu partai dalam percaturan politik, makin mudah bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui sosok dan kiprah partai politik tersebut.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini sebagai upaya untuk mencari perbandingan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun hasil dari temuan yang peneliti temukan terkait dengan judul penelitian yang diangkat:

Penelitian Pertama, yang dilakukan oleh Debora Sanur Lindawati yang berjudul “Strategi Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilu 2014”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem dan aturan main dalam pemilu 2014 dan bagaimana strategi parpol dalam menghadapi pemilu 2014. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teori dan konsep yang digunakan adalah teori sistem pemilu, teori



perwakilan, teori elite sebagai wakil rakyat, teori partai politik, dan konsep strategi kampanye politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketing politik tidak dapat hanya dilihat selama periode kampanye saja.

Partai politik harus terus menerus memperhatikan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana Partai dan para caleg dan capresnya terus melakukan kampanye politik yang bersifat jangka panjang dan dilakukan secara terus menerus, karena tujuan dari marketing politik secara umum adalah untuk menjadikan pemilih sebagai subyek dan bukan sebagai obyek politik. Dalam strategi pemenangan pemilunya, partai perlu mengorganisir kegiatan kampanye secara kolektif. Oleh karenanya di tengah apatisme masyarakat terhadap partai, para politisi dan partai harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masih ada politikus yang bertanggungjawab kepada konstituennya.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Muhammad Lutfi yang berjudul "Pelebagaan Partai Politik Di Tingkat Lokal (Studi tentang pelembagaan partai Golkar di kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009 dan untuk mengungkap kendala-kendala yang dihadapi Partai Golkar di Kabupaten Sinjai dalam proses pelembagaan partainya. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep partai politik dan teori pelembagaan partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kealahannya pada Pemilu 2009 belum berhasil membangun kelembagaan partai yang kuat, dengan beberapa alasan. Pertama, Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam hal-hal tertentu terkait dalam pengambilan keputusan masih dipengaruhi oleh kuatnya unsur ketokohan dan elitisme, baik yang berasal dari internal Partai Golkar Kabupaten Sinjai sendiri maupun dari level-level di atasnya (DPD I dan DPP). Kedua, pengurus partai di daerah jarang sekali melakukan inovasi dan kreatifitas program yang dapat mendukung arah dan perjuangan sesuai dengan visi dan misi partai. Program-program yang dilaksanakan senantiasa dilakukan sekedar melaksanakan amanah partai, tanpa ada tindak lanjut nyata sebagai wujud keberlanjutan program. Ketiga, lemahnya pemahaman kader partai akan ideologi dan platform partai sebagai basis identitas partai. Keempat, Partai Golkar Kabupaten Sinjai secara kelembagaan sampai saat ini tidak memiliki basis yang kuat di masyarakat.

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Ilham Prawansyah yang berjudul "Institusionalisasi Partai Politik (Studi Tentang Konsolidasi Internal DPD II Golkar Makassar Menjelang Pilwalkot 2013)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui derajat institusionalisasi dalam melakukan konsolidasi internal di tubuh DPD II Golkar Makassar menjelang Pilwalkot 2013, Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah partai politik, institusionalisasi partai politik, dan hukum besi oligarkis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perlawanan dari beberapa kader muda terhadap keputusan DPP Partai Golkar dalam rekomendasi dukungan dikarenakan penetapan pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid pada Pilwalkot Makassar tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Golkar. DPP mengindahkan hasil dari konsolidasi yang telah lama dibangun kader di tingkat pengurus lokal untuk mengutamakan calon yang dapat diterima di masyarakat Makassar dan juga di internal Golkar Makassar. Dinamika yang terjadi juga sangat mempengaruhi solidaritas kader Golkar terhadap usungan Partai Golkar yaitu pasangan SuKa. Seperti kurangnya dukungan langsung dari DPD I Golkar Sulawesi Selatan terhadap kemenangan SuKa di Pilwalkot Makassar mengindikasikan terjadinya perpecahan di internal partai. Selain itu, majunya Irman Yasin Limpo (None) menjadikan beberapa kader memilih untuk solid ke None ketimbang mensosialisasikan usungan partai Golkar walaupun DPD II Golkar Makassar secara tegas menindak kader yang telah melawan keputusan partai dengan sanksi pemecatan.

Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Andi Rahmat Hidayat yang berjudul "Institusionalisasi Partai Politik (Studi Tentang Rekomendasi Dukungan DPW PAN Sulawesi Selatan Pada Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang Tahun 2013)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika organisasi DPW PAN Sulawesi Selatan pasca rekomendasi dukungan pada pasangan Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang pada pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2013 dan bagaimana

proses institusionalisasi yang terjadi dalam tubuh DPW PAN Sulawesi Selatan pasca rekomendasi dukungan kepada pasangan Syahrul Yasin Limpo – Agus Arifin Nu'Mang pada pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2013. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah partai politik dan institusionalisasi partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan beberapa indikasi yang telah melemahkan kedaulatan institusi partai secara kelembagaan. Permasalahan yang dihadapi berupa perbedaan pendapat dalam menyikapi rekomendasi dukungan yang dikeluarkan oleh DPP PAN. Beberapa elit dan entitas partai di tingkat grassroot memperlihatkan sikap yang bertolakbelakang dengan keputusan tersebut, yang notabeneanya mengikat bagi seluruh elemen dalam partai. Sehingga hal ini berimplikasi pada kedaulatan institusi partai secara menyeluruh dimana beberapa kader membelokkan dukungan ke pasangan Ilham–Aziz (IA). Namun secara umum, DPW PAN SULSEL tetap menunjukkan bahwa dinamika yang berlangsung di internal partai mampu disikapi secara baik dalam menunjang penguatan institusionalisasi partai, diantaranya dengan melakukan upaya penguatan aturan organisasi partai sebagai bentuk kedaulatan partai secara menyeluruh. hal ini terbukti ketika DPW PAN sebagai partai koalisi mampu memaksimalkan peranannya dalam memenangkan Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang di PILGUB SULSEL tahun 2013.

Penelitian kelima, yang dilakukan oleh Hijriyah Y yang berjudul “Institusionalisasi Partai Nasdem Di Kabupaten Gowa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Partai Nasdem dalam memperluas jaringan politiknya di Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui kendala apa yang dialami partai Nasdem dalam memperluas jaringan politiknya di Kabupaten Gowa. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah partai politik dan institusionalisasi partai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perluasan struktur politik sebagai salah satu alasan digalinya upaya-upaya perluasan jaringan politik yang merupakan langkah awal bagi Partai NasDem Gowa, terdapat beberapa upaya yang lainnya antara lain *sistem o250* (yang merupakan sistem informasi dan perekrutan taraf online yang sangat membantu pergerakan Partai NasDem Gowa yang isi dan fungsinya akan dipaparkan pada isi pembahasan), upaya melalui kinerja caleg Partai NasDem Kabupaten Gowa, penguatan dan perluasan struktur pengurus, kinerja dari sayap-sayap Partai NasDem Kabupaten Gowa, integrasi semua elemen dengan tujuan yang memperkuat kedudukan NasDem, Media massa yang menunjang keberadaan Partai NasDem Gowa, sosialisasi Partai NasDem Gowa. Adapun kendala yang dihadapi Partai NasDem Gowa dalam upaya tersebut antara lain kendala internal seperti dampak cara baru berpartai Partai NasDem Gowa dan program khusus masyarakat, adapun kendala eksternal seperti masyarakat pragmatis dan partai kompetitor dan oknum masyarakat yang kontra. Upaya dan kendala

yang ada di Partai NasDem Gowa ini menunjukkan telah adanya langkah dari Partai NasDem Gowa dalam menginstitutionalisasi partainya.

Penelitian keenam, yang dilakukan oleh Muh. Sulfi Hidayatullah yang berjudul “Institutionalisasi Partai Perindo Di Makassar (Peran Elite Dalam Pengembangan Jaringan Politik Partai)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran elite dalam pengembangan jaringan politik Partai Perindo di Makassar. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori elite, partai politik, hukum besi oligarki, dan institutionalisasi partai politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan jaringan politik partai Perindo di kota Makassar didukung dari peran figure dan kemampuan finansial elit yang mampu mendongkrak penerimaan partai di masyarakat dan pemanfaatan media yang begitu massif sehingga partai dengan mudah memperkenalkan organisasi dan elit politiknya, lewat media pula pesan-pesan politik mampu disampaikan melalui iklan dan tayangan yang telah diatur sedemikian rupa untuk maksud serta pesan tertentu. Orang-orang diluar organisasi (partai) juga terlibat aktif dalam proses politik atau disebut sebagai simpatisan walaupun tidak berperan aktif secara struktural organisasi namun dukungan dan support simpatisan begitu berarti dalam mengembangkan jaringan politik partai. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, maka penulis melihat adanya kesamaan tema dan lokasi penelitian yang akan dilakukan sehingga menjadi alasan untuk dijadikan bahan rujukan untuk melakukan

analisis pada temuan penelitian ini. Adapun perbedaan yang ditemukan antara penelitian yang akan dilihat pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian sebelumnya lebih fokus pada strategi partai dalam memenangkan pemilu, seperti peran elite partai dan bagaimana partai politik memperluas jaringan politiknya. Selain itu penelitian sebelumnya juga fokus pada evaluasi hasil pemilu bukan pada tahap persiapan menghadapi pemilu. Penelitian ini mengkaji tentang persiapan Partai Golkar dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024. Pada penelitian ini akan melihat seperti apa persiapan Partai Golkar dalam menghadapi pemilihan legislatif 2024 dari segi institusionalisasi partainya.

#### **2.4. Kerangka Pemikiran**

Dalam melihat fenomena politik di Indonesia khususnya pada pemilihan legislatif tahun 2024 yang akan datang, peneliti menggunakan pendekatan dan teori untuk menjelaskan apa yang menjadi rumusan masalah dari penelitian yang diajukan. Sesuai dengan pendekatan dan teori yang dijabarkan diatas, sekiranya dapat menjelaskan banyak hal tentang analisa institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi kesisteman dan pengetahuan publik dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024.

Dalam kaitan dengan persiapan menghadapi Pemilu 2024, Partai Golkar memperkuat kaderisasi. Terkait dengan standar rekrutmen anggota dan pengurus di internal Partai Golkar, secara prosedural telah

diatur dalam AD/ART partai. Selain sistem rekrutmen dan kaderisasi, Partai Golkar sebagai sebuah partai yang telah lama berkiprah, memiliki organisasi-organisasi internal yang cukup banyak sebagai bagian integral partai. Dalam tubuh Partai Golkar dikenal adanya organisasi-organisasi baik yang dibentuk oleh partai maupun organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada Partai Golkar. Partai Golkar menggunakan kader dan keseluruhan anggota organisasi pendiri atau Hasta Karya dan organisasi yang didirikan untuk membantu pemenangan Pemilu tahun 2024 mendatang melalui pembentukan kelembagaan partai secara struktural.

Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam pelaksanaannya menerapkan demokrasi di internal partai untuk senantiasa berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada dalam AD/ART Partai . Hal itu dilakukan untuk memberikan peluang kepada seluruh anggota dan pengurus untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan hanya dalam penerapan aturan-aturan dalam partai, tetapi juga berlaku dalam semua proses pengambilan kebijakan.

Partai Golkar Sulawesi Selatan sendiri lebih mengedepankan proses musyawarah dalam membuat aturan maupun dalam perumusan kebijakan tertentu. Menurut prosedur yang ada, bahwa beberapa kebijakan dapat ditentukan sendiri oleh pengurus DPD I, juga ada yang harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari level yang lebih tinggi dalam hal ini DPP. Jika kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan tidak terlalu urgen dan strategis, Partai Golkar Sulawesi Selatan biasanya



melakukan rapat pengurus, misalnya dalam menentukan panitia-panitia kegiatan partai. Untuk menjaga terjaminnya proses demokrasi dalam partai, senantiasa diupayakan melaksanakan rapat konsolidasi tiap bulan di Kantor DPD I.

Hasil penelitian dengan beberapa wawancara yang telah dilakukan, bahwa dari segi keutuhan organisasi Partai Golkar Sulawesi Selatan relatif aman. Meskipun kadang muncul faksi-faksi di dalam partai, namun munculnya faksi tersebut tidak sampai mengganggu keutuhan organisasi. Mekanisme yang dilakukan untuk menghindari terjadinya faksi atau perpecahan dalam tubuh partai ke depan, Partai Golkar Sulawesi Selatan berupaya untuk meredam dengan melakukan konsolidasi internal partai.

Partai Golkar melalui rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang dilaksanakan di Makassar menekankan pentingnya pelembagaan atau institusionalisasi partai dalam dimensi kesisteman hal itu disampaikan langsung oleh ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam sambutannya bahwa langkah persiapan yang utama dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang adalah konsolidasi internal Partai Golkar untuk memperkuat pelembagaan atau institusionalisasi partai. Hal ini sejalan dengan perkataan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid yang mendorong adanya konsolidasi secara menyeluruh di tubuh DPD I Partai Golkar Sulsel, terlebih pemilu 2024 sudah di depan mata, dimana partai politik lain sudah bergerak dan bermanuver untuk merebut posisi Partai Golkar melihat ketatnya peta persaingan politik di Sulawesi Selatan.

Partai Golkar Sulawesi Selatan dibawah komando Taufan Pawe telah menyelesaikan konsolidasi 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, sejauh ini 24 Kabupaten/Kota sudah menggelar musyawarah daerah memilih ketua baru definitif, 7 diantaranya dipimpin oleh kepala daerah kader Golkar. Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe menargetkan Partai Golkar kembali menjadi pemenang pemilu di Sulawesi Selatan. Partai Golkar Sulawesi Selatan juga memperkuat kaderisasi dan menggunakan seluruh kader dan pengurus partai untuk membantu kemenangan pada pemilihan legislatif tahun 2024 yang akan datang melalui pembentukan kelembagaan partai secara struktural.

Dalam dimensi pengetahuan publik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengintruksikan seluruh kader Golkar untuk terus bergerak dan turun langsung dalam penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional agar lebih dekat dengan masyarakat.

Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan merespon intruksi dari ketua umum dengan meluncurkan *Yellow Clinic* yang diresmikan bersamaan dengan pelantikan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe di acara ulang tahun Golkar yang ke-57, Taufan Pawe mengatakan *Yellow Clinic* ini bukan sekedar klinik biasa, klinik ini bersifat pratama yang artinya mulai dokter dan perawatnya

itu jelas dan bisa bekerja sama dengan BPJS, sehingga klinik ini memang serius melayani masyarakat. Selain *Yellow Clinic* DPD I Partai Golkar Sulsel telah menggelar sejumlah kegiatan kemanusiaan seperti bantuan UMKM, bantuan bencana alam, bantuan Pendidikan dan Kesehatan, serta vaksinasi.

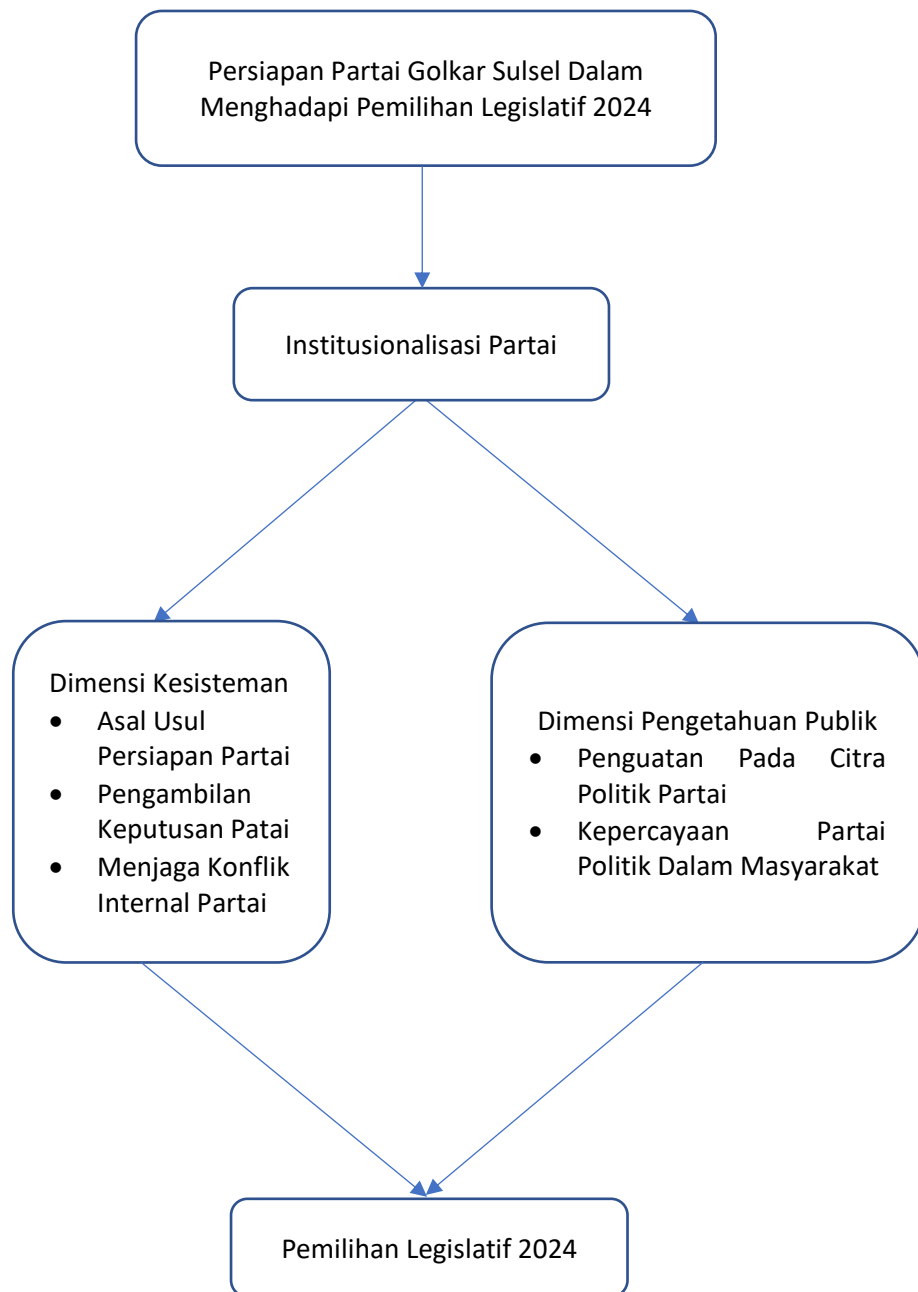
Dimensi Institusionalisasi partai yang dikemukakan oleh *Randall dan Svasand* inilah yang kemudian menjadi rujukan dalam penelitian ini, dimana terdapat empat dimensi, namun karena keterbatasan penulis dalam menggali informasi terkait empat dimensi dan melihat kecenderungan DPD I Partai Golkar Sulsel dalam menghadapi pemilihan legislatif lebih kepada dua dimensi yaitu pertama dimensi kesisteman yang berkaitan dengan proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik, kesisteman DPD I Partai Golkar Sulsel akan dilihat dari bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi partai guna mempersiapkan diri dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024.

Kedua dimensi pengetahuan publik, merujuk pertanyaan bagaimana DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mencitrakan dirinya menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024? Sehingga dimensi institusionalisasi *Randall dan Svasand* nantinya akan digunakan dalam menganalisis bagaimana institusionalisasi DPD I Partai Golkar Sulsel

pada dimensi kesisteman, dan pengetahuan publik dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang?

## **2.5. Skema Kerangka Pikir**

Skema kerangka pikir yaitu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel. Penelitian dengan adanya dua variabel atau lebih biasanya dirumuskan berbentuk komparasi maupun hubungan. Kerangka pikir yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

Pada bagian ini, pembahasan mengenai metode penelitian akan dibagi beberapa bagian yaitu lokasi penelitian, tipe penelitian dan dasar penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

#### **3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu atau periodisasi penelitian ini mulai dari persiapan yang dilakukan Partai Golkar Sulawesi Selatan pasca pemilu 2019 sampai saat ini. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Peneliti kemudian tertarik meneliti tentang bagaimana institusionalisasi dimensi kesisteman dan pengetahuan publik DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024. Institusionalisasi dimensi kesisteman dan pengetahuan publik DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan selanjutnya akan dipaparkan pada bagian pembahasan.

#### **3.2. Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian**

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian dalam hal ini mengenai institusionalisasi dimensi kesisteman dan pengetahuan publik DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam menghadapi pemilihan legislatif 2024.

Dasar penelitian adalah menggunakan dasar penelitian deskriptif, dengan paradigma definisi sosial ini akan memberi peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan interpretasi, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap interpretasi itu sampai mendapatkan pengetahuan mengenai institusionalisasi dimensi kesisteman dan pengetahuan publik DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam menghadapi pemilihan Legislatif tahun 2024 . Penelitian kualitatif mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam.<sup>19</sup>

### **3.3. Jenis Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, atau dapat pula melalui penelitian langsung melihat kondisi lingkup penelitian.<sup>20</sup>, sebagaimana

---

<sup>19</sup> Bruce a. Chadwick H. metode penelitian ilmu Pengetahuan Sosial. hlm. 234

<sup>20</sup> Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset

dalam penelitian ini adalah DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan data dan informasi maka penulis melakukan wawancara (komunikasi langsung) dengan para informan yaitu turun langsung ke DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Dari proses wawancara dengan berbagai sumber peneliti mendapatkan data-data seperti, data-data kepengurusan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan serta kegiatan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mengenai proses institusionalisasi dimensi kesisteman dan pengetahuan publik partainya dalam menghadapi pemilihan legislatif 2024 yang akan datang.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, koran dan dari situs internet<sup>21</sup>, yang berhubungan dengan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer* sedangkan

---

<sup>21</sup> Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV



orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.<sup>22</sup> Penulis nantinya langsung melakukan wawancara mendalam dengan pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan yaitu Bendahara Umum, Wakil Ketua bidang kaderisasi, Wakil Ketua bidang pemenangan pemilu, Ketua AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar), dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Golkar. Adapun mengapa hal ini dilakukan karena dengan didapatkannya data dari pengurus partai maka kemungkinan ketepatan data lebih besar serta permasalahan mengenai institusionalisasi kesisteman dan pengetahuan publik partai yang akan digali dalam penelitian ini akan terjawab. Mereka yang dijadikan informan dalam wawancara adalah:

1. Bendahara Umum DPD I Partai Golkar Sulsel
2. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD I Partai Golkar Sulsel
3. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD I Partai Golkar Sulsel
4. Ketua AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) Sulawesi Selatan
5. Anggota DPDR Sulsel Fraksi Partai Golkar

## 2. Studi Pustaka dan Dokumen

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Teknik ini untuk lebih penunjang data primer atau data utama yang diperoleh dari informan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang

---

<sup>22</sup> Husaini Usman. Metodologi Penelitian Sosial. Hal 58

diperoleh dengan dokumen-dokumen.<sup>23</sup> Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung diperoleh dari pihak pertama. Data dan dokumen yang dimaksud ialah data dan dokumen yang diperoleh apakah itu dari pihak utama atau dalam hal ini pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, atau bahkan data-data dari sumber lain yang cukup terpercaya memadai penelitian mengenai DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari informan akan diolah dan dianalisa secara kualitatif. Dikarenakan dalam metode kualitatif terdapat beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi.

Objek kajian penulisan ini adalah menganalisa bagaimana institusionalisasi dimensi kesisteman dan pengetahuan publik DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam menghadapi pemilihan legislatif 2024. Penelitian ini mencoba memahami dan menggali mengenai langkah DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam menginstitusionalisasi dimensi kesisteman dan pengetahuan publik partainya. Analisa ini bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi di lokasi penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat

---

<sup>23</sup> Husaini Usman. Metodologi Penelitian Sosial. Hlm. 73

digambarkan secara terperinci. Sehingga apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini bisa terjawab dengan maksimal.

Analisis data pada penelitian ini dimulai dari penghimpunan dari data-data yang diperoleh di mana nantinya data-data kasar yang diperoleh dari informan yang dituju yaitu data-data yang diperoleh dari pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, merupakan informan tambahan mengenai dimensi institusionalisasi kesisteman dan pengetahuan publik DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Data yang diperoleh dipilah dan dihimpun, lalu data-data tersebut akan digolongkan sesuai permasalahan penelitian, dalam hal ini upaya institusionalisasi dimensi kesisteman dan pengetahuan publik DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024. Tentunya penggolongan ini menggunakan ketajaman analisis, agar pemilahan data dan penggolongan data sesuai dan tepat serta memudahkan proses penelitian atau pengolahan hasil penelitian selanjutnya.

Data yang didapatkan di kelompokkan sesuai pertanyaan penelitian maka data-data yang telah terkelompokkan itu di sajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, dalam hal ini nantinya akan disajikan dalam bentuk uraian naratif yang tersusun secara sistematis. Dikarenakan dari data inilah akan ditarik makna apakah jawaban penelitian terjawab atau tidak, serta apakah jawaban dari pertanyaan penelitian dapat dibuktikan kevalidan datanya, hal ini dilakukan agar mudah dipahami dan akan

mudah ditarik kesimpulan didalamnya atau mempermudah hingga pada ke penarikan kesimpulan.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Partai Golongan Karya

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman.<sup>24</sup> Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer khususnya Perwira Angkatan Darat yang menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, serta nelayan.<sup>25</sup>

Sekber Golkar muncul karena ulah PKI beserta organisasi sayapnya yang merongrong masyarakat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Adapun Ketua Pertama Sekber Golkar ialah Brigjen Djuhartono lalu digantikan Mayjen Suprpto Sukowati pada Desember 1965. Tujuan dari Sekber ini adalah untuk mewadahi perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar di bawah haluan Pancasila dan UUD 1945.

Sekber Golkar mempunyai 291 total organisasi di dalamnya. Setelahnya, organisasi tersebut diklasifikasi menjadi tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) berdasarkan karya. Adapun ketujuh KINO tersebut adalah:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO);

---

<sup>24</sup> Partai Golongan Karya, "Sejarah Partai Golkar". <https://www.partaigolkar.com/profil/>. Diakses 15 Februari 2023.

<sup>25</sup> Partai Golongan Karya (Golkar). <https://www.satukanindonesia.com/partai-golongan-karya-golkar/>. Diakses 15 Februari 2023.

2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI);
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR);
4. Organisasi Profesi;
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM);
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI);
7. Gerakan Pembangunan Untuk menghadapi Pemilu 1971.<sup>26</sup>

Tujuh KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.<sup>27</sup>

Pasca-G/30S-PKI, Sekber Golkar mendapatkan dukungan penuh dari Soeharto sebagai pimpinan militer. Dukungan tersebut menjadikan Golkar memiliki kekuatan untuk menaklukkan PKI dan basis dukungan terhadap Soekarno. Pada tataran ini, Golkar menjadi penopang kekuatan Orde Baru disamping ABRI.<sup>28</sup>

Pada era Orde Baru, Kader Golkar banyak yang mendapatkan posisi strategis di kelembagaan Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif. Pada era reformasi, Golkar yang merupakan basis massa pendukung Soeharto turut mendapatkan imbasnya berupa tuntutan pembubaran yang merupakan seri lanjutan dari lengsernya Soeharto.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Saat masa transisi dari Orba menuju Reformasi, turbulensi politik terjadi kepada Partai Golkar. Krisis citra dan perpecahan internal menjadi turbulensi paling kuat yang menghantam Golkar. Pada tahun 1998 hingga 2004, partai dapat diselamatkan lewat tangan dingin Akbar Tandjung, yakni ketua umum Partai Golkar pada periode tersebut. Tandjung bergerak ke daerah-daerah basis akar rumput untuk melakukan konsolidasi kader partai serta pendataan keanggotaan yang sekaligus menandai Partai Golkar sebagai partai modern yang menerapkan tertib administrasi.<sup>30</sup>

Pada era kepemimpinan Aburizal Bakrie, tepatnya di tahun 2015 terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh Partai Golkar menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah pimpinan Aburizal Bakrie yang ditetapkan sebagai Ketua Umum melalui Munas Bali. Kubu kedua adalah pimpinan Agung Laksono yang ditetapkan lewat Munas Ancol.<sup>31</sup> Dinamika tersebut berlangsung dalam kurun waktu selama kurang lebih satu tahun. Akhir dari dualisme tersebut diselesaikan dengan Pemberlakuan kembali kepengurusan Riau 2009 yang ditegaskan lewat Surat Keputusan Menkumham dengan Nomor M.HH-02.AH.11.01/2016, yang menyatakan Menkumham mengesahkan kembali surat Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01/2012, tentang Komposisi DPP Partai Golkar. Kepengurusan yang dihidupkan selama enam bulan itu punya

---

<sup>30</sup> Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengan Tubulendi Politik Era Transisi*, Jakarta: Gramedia, 2007, 112-114

<sup>31</sup> Koran Sindo. "Beda Munas Bali dan Munas Ancol". <https://nasional.sindonews.com/berita/977556/149/beda-munas-bali-dan-munas-ancol>. Diakses pada 15 Februari 2023.

wewenang untuk menetapkan panitia Munaslub, sesuai AD/ART partai yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan.<sup>32</sup>

Selama 59 tahun (1964-2023) kiprah di kancah politik di Indonesia, Partai Golkar telah mengalami dua belas periode kepemimpinan. Berikut ini adalah daftar Ketua Umum Partai Golkar di setiap periode.

Periode	Ketua Umum Golkar
1964 -1969	Djuhartono
1969 - 1973	Suprpto Sukowati
1973 - 1983	Amir Moertono
1983 - 198	Sudharmono
1988 - 1993	Wahono
1993 - 1998	Harmoko
1998 - 2004	Akbar Tandjung
2004 - 2009	Jusuf Kalla
2009 - 2014	Aburizal Bakrie
Januari - Mei 2016	Aburizal Bakrie
2014 - 2016	Dualisme Kepemimpinan: Aburizal Bakrie vs Agung Laksono
2016 - 2017	Setya Novanto
2017 - 2019	Airlangga Hartarto
2019 - Sekarang	Airlangga Hartarto

Sumber: Website DPD Riau, 2023<sup>33</sup>

#### a. Profil Partai Golongan Karya (Golkar)

Ketua Umum : Airlangga Hartanto

Sek. Jendral : Lodewijk F. Paulus

Dibentuk : 20 Oktober 1964

Kantor Pusat : Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.16/RW.1,

<sup>32</sup> Penerbitan SK Riau Langkah Pemerintah Selesaikan Konflik Golkar. <https://politik.rmol.id/read/2016/01/28/233795/penerbitan-sk-riau-langkah-pemerintah-selesaikan-konflik-golkar->. Diakses 15 Februari 2023.

<sup>33</sup> DPD Partai Golongan Karya Riau, "Sejarah". Golkar Riau. <https://www.golkarriau.com/web/site/sejarah.html>. Diakses 16 Februari 2023.



Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta  
Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ideologi : Nasionalis-Karya Kerakyatan

Kursi di DPR RI : 85 (14,78% dari 575)

Website : <https://www.partaigolkar.com/kantor-partai/>.

Doktrin karya kekaryaannya membuat Partai Golkar selalu melihat masyarakat dalam perspektif fungsi, bukan dalam perspektif ideologi, apalagi aliran. Pengelompokan masyarakat yang terbaik dalam perspektif Partai Golkar adalah pengelompokan berdasarkan peran dan fungsinya.<sup>34</sup>

Doktrin karya kekaryaannya Partai Golkar berorientasi pada program (program oriented) dan atau pemecahan masalah (problem solving), bukan berorientasi pada aliran atau ideologi (ideology oriented). Dengan perspektif ini Partai Golkar menegaskan sikap tidak sepakat terhadap pengelompokan politik berdasarkan primordialisme dan sektarianisme. Pembelahan masyarakat berdasarkan ideologi atau aliran-aliran dikhawatirkan akan melahirkan konflik-konflik ideologi yang bermuara pada pertentangan, perpecahan, dan bahkan disintegrasi bangsa.<sup>35</sup>

Orientasi semacam ini bertujuan agar masyarakat tidak akan terjebak dalam pertentangan atau konflik ideologi yang tidak perlu, melainkan berorientasi pada karya untuk membangun bangsa. Bagi Partai Golkar, karya yang baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat adalah lebih penting daripada ide atau gagasan semata. Karya kekaryaannya adalah

---

<sup>34</sup> Partai Golongan Karya, *Op.Cit.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara sadar, terencana, sistematis, dan menyeluruh, untuk mendatangkan manfaat bagi rakyat. Karya kekaryaan adalah juga amal shalih dalam pengertian yang luas sebagaimana yang diajarkan agama-agama.<sup>36</sup>

Tujuan Partai Golkar dalam setiap programnya adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia.<sup>37</sup>

Untuk mencapai harapan dan keinginan sebagaimana diuraikan sebelumnya, Partai Golkar memiliki visi sebagai berikut:

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.<sup>38</sup>

Untuk mencapai visi tersebut partai golkar memiliki misi:

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.<sup>39</sup>

## **b. Logo dan Lambang Partai**

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*



Lambang Partai Golkar adalah sebagai berikut:

Makna dari lambang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pohon beringin melambangkan partai yang memberikan perlindungan pada rakyat Indonesia.
2. Pada dan kapas melambangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia
3. Perisai bersegi 5 melambangkan ideologi atas dasar partai Golkar yakni Pancasila.
4. Bunga kapas berjumlah 17, Akar bergantung di pohon beringin berjumlah 8 dan 45 butir padi melambangkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945.
5. Warna Putih melambangkan kesucian
6. Warna Kuning melambangkan kejayaan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> "Makna Lambang Golkar, Salah Satu Partai Tua Yang Sudah Terbentuk Sejak 1964." <https://www.zonahobisaya.web.id/2022/02/makna-lambang-golkar-partai-yang-sudah.html>. Diakses 15 Februari 2023.

## 4.2 Gambaran Umum DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan

### a. Profil DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan

DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan merupakan entitas Partai Golkar di Tingkat Provinsi yang bertempat dan memiliki tanggung jawab kepengurusan organisasi partai di wilayah Sulawesi Selatan. Secara struktural, DPD I Partai Golkar Sulsel berada di bawah DPP Partai Golkar yang memiliki jangkauan secara nasional. Berikut ini adalah profil DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Nama Organisasi	: DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan
Ketua	: H. M. Taufan Pawe
Sekretaris	: Andi Marzuki Wadeng
Bendahara	: Andi Ina Kartika Sari
Alamat Kantor	: Jl. Amanagappa No.2, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Jumlah Kursi DPRD	: 13 dari 85 kursi.
Website	: <a href="https://www.golkarsulsel.org/">https://www.golkarsulsel.org/</a>
SK. Kepengurusan	: SKEP-378/DPP/GOLKAR/XI/2020. Pada tanggal 19 November 2020.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bagian ini memuat gagasan atau pemikiran peneliti yang terkait dengan apa yang telah dilakukan, dan apa yang telah diamati pada saat penelitian. Dipaparkan, dianalisis serta diuraikan dalam bentuk tulisan yang dikaitkan dengan hasil kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan membahas tentang persiapan Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024.

#### **5.1. Dimensi Kesisteman DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan**

Dimensi kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanismenya yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu.

Dimensi kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) siapakah yang menentukan dalam

pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (c) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART).

#### **a. Asal Usul Persiapan Partai Golkar Sulawesi Selatan**

Pada tahun 1998-1999 banyak partai politik baru yang berdiri, partai yang lahir dari reformasi politik 1998, menawarkan berbagai agenda perubahan dan perbaikan kehidupan bangsa dan negara, banyak partai juga banyak gagasan baru untuk Indonesia masa depan, namun dalam kenyataannya, partai-partai tersebut gagal memperoleh dukungan luas dari masyarakat, bahkan ada yang harus bubar sebagai konsekuensi dari pengaturan batas minimal perolehan dukungan masyarakat (parliamentary threshold).<sup>41</sup>

Penurunan elektabilitas Partai Golkar di era reformasi pada kenyataannya tidak sama dengan asumsi sejumlah orang yang menganggap bahwa reformasi 1998 akan melumpuhkan Partai Golkar secara struktural hingga level akar rumput. Faktanya, Selama pemilu tahun 1999 sampai 2019 perolehan suara Partai Golkar masih tinggi dalam perhitungan nasional. Perolehan ini tidak terlepas dari keutuhan

---

<sup>41</sup> Syarifuddin Jurdi, "Pergeseran Dan Konfigurasi Politik Hasil Pileg 2019: Kajian Dan Analisis Terhadap Dinamika Politik Di Sulawesi Selatan", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 7, No. 2 2019, 165.

perolehan suara, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang secara substansial menyumbang perolehan suara di tingkat nasional.<sup>42</sup>

Sejak Orde Baru hingga Pemilu 2019, Partai Golkar merupakan partai politik yang cukup kuat mengakar dalam masyarakat Sulawesi Selatan, meski Golkar diidentikkan dengan partai Orde Baru dan merupakan partai yang paling bertanggung jawab atas kemerosotan bangsa, tidak berarti partai ini mengalami pemudaran pengaruh, bahkan pasca Orde Baru menunjukkan bahwa partai ini masih cukup kuat dan dominan.

Partai Golkar dikenal sebagai partai kader atau partai massa, partai politik mempunyai tanggung jawab melaksanakan rekrutmen politik. Artinya, partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dalam pengertian ini berarti partai politik turut serta memperluas partisipasi politik dalam masyarakat. Usaha rekrutmen politik ini dapat dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi (pendekatan), dan menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang akan menggantikan pemimpin lama pada masa mendatang.

Rekrutmen partai politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa. Selain itu, melalui partai politik-lah dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon anggota

---

<sup>42</sup> Agam Primadi, Titin Purwaningsih, "Institusionalisasi Partai Politik dalam Pilkada 2017 (Studi Kasus: Partai Golkar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)", *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 3, No. 1, April 2019.



lembaga perwakilan maupun kepala pemerintahan. Calon-calon tersebut nantinya akan dipilih oleh rakyat baik pusat maupun daerah juga dipilih dengan rekrutmen dan seleksi melalui partai politik.

Proses rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk pengurus dan pejabat-pejabat di lingkup partai intens dilakukan. Secara program Partai Golkar memiliki arah yang jelas untuk terus melakukan pengembangan kompetensi bagi kader-kadernya. Sehingga respon Partai Golkar Sulawesi Selatan adalah dengan berupaya melaksanakan amanah partai sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang diberikan oleh partai.

Dalam kaitan dengan persiapan menghadapi Pemilu 2024, Partai Golkar memperkuat kaderisasi. Terkait dengan standar rekrutmen anggota dan pengurus di internal Partai Golkar, secara prosedural telah diatur dalam AD/ART partai. Partai Golkar merupakan partai terbuka dan menerima semua kalangan untuk bergabung dengan partai, yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Namun demikian, berbagai upaya ditempuh oleh partai agar kesinambungan keanggotaan partai tetap terjaga. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan berbagai pendekatan yang berusaha dilakukan oleh partai untuk merekrut anggota baru. Abbas Hady, selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi mengatakan bahwa :

*“...Sistem kaderisasi di Golkar itu berjenjang juga ada beberapa macam instrumen untuk mengkader atau kategori kader, ada melalui Kader Teritorial Desa atau biasa disebut*

*KARAKTERDES, ada juga Kader Fungsional namanya KARSINAL.”<sup>43</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menilai bahwa Kader Teritorial Desa atau KARAKTERDES ini ditujukan untuk menggalang kekuatan dari masyarakat desa untuk dijadikan sebagai tenaga penggerak partai di masyarakat. Output dari program ini adalah para kader yang telah mengikuti kegiatan, diberikan bekal untuk dapat terjun di masyarakat dan membantu pembangunan khususnya di pedesaan, sambil berupaya memperluas basis dukungan partai di desa. Oleh karenanya, peserta KARAKTERDES ini bukan hanya dari para kader dan anggota Partai Golkar, tapi diupayakan untuk menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda dari tingkat desa. Kader Fungsional atau KARSINAL tidak terbatas wilayah, mereka bergerak kemana saja berdasarkan penugasan dan fungsinya. KARSINAL mempunyai tugas untuk mengembangkan potensi-potensi di sekitarnya, berdasarkan profesi-profesi yang ada di sekitarnya.

Selain sistem rekrutmen dan kaderisasi di atas, Partai Golkar sebagai sebuah partai yang telah lama berkiprah, memiliki organisasi-organisasi internal yang cukup banyak sebagai bagian integral partai. Dalam tubuh Partai Golkar dikenal adanya organisasi-organisasi baik yang dibentuk oleh partai maupun organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada Partai Golkar. Organisasi tersebut yang dikenal di

---

<sup>43</sup> Wawancara langsung dengan Abbas Hady, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, di Rumah Pribadi Narasumber, Pada tanggal 12 Februari 2023.

antaranya adalah organisasi sayap partai yang terdiri dari organisasi pendiri, dan organisasi yang didirikan.

Partai Golkar dalam kaitannya mengenai upaya kemenangan dalam Pemilu 2024 telah memiliki basis dukungan partai yang cukup kuat di Sulsel. Basis dukungan tersebut sebagaimana diungkapkan sebelumnya adalah dari organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar. Adapun organisasi pendiri Partai Golkar yang biasa disebut Hasta Karya yaitu , KOSGORO atau Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royon, MKGR atau Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, dan SOKSI atau Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia. Ketiga organisasi inilah yang kemudian mendirikan Partai Golkar. Adapun organisasi yang didirikan Partai Golkar adalah Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar atau KPPG, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI, Satuan Karya Ulama atau Satkar Ulama, Majelis Dakwah Islamiyah atau MDI, Himpunan Wanita Karya, dan Pengajian Al-Hidayah.

Partai Golkar menggunakan kader dan keseluruhan anggota organisasi pendiri atau Hasta Karya dan organisasi yang didirikan untuk membantu kemenangan Pemilu tahun 2024 mendatang melalui pembentukan kelembagaan partai secara struktural. Sebagaimana yang dikatakan oleh La Kama Wiyaka selaku Ketua Bidang Kemenangan Pemilu DPD I Partai Golkar :

*“....Persiapan yang kita lakukan saat ini berupa pembentukan kelembagaan partai secara struktural dari DPD I,*

*DPD II, Kecamatan sampai ke Desa yang pengurusnya kita ambil dari organisasi-organisasi sayap partai baik organisasi sendiri maupun organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar, kita akan maksimalkan untuk 2024.”<sup>44</sup>*

Wawancara di atas mengindikasikan bahwa Partai Golkar menggunakan kader dan keseluruhan anggota organisasi sayap untuk membantu kemenangan Pemilu 2024. Selanjutnya dijelaskan oleh La Kama Wiyaka bahwa jumlah pengurus di tiap tingkatan berbeda-beda yakni 75 orang ditingkat Provinsi, 45 orang disetiap Kabupaten/Kota, 25 orang setiap Kecamatan dan 15 orang tiap-tiap Desa, sedangkan di TPS akan ditugaskan 10 orang per TPSnya untuk mengawal jalannya proses pemilihan.

Selain pembentukan kelembagaan partai secara struktural, para kader dan pengurus organisasi sayap juga bisa berkontestasi langsung sebagai calon anggota legislatif karena setiap organisasi sayap berhak merekomendasikan pengurusnya menjadi calon anggota legislatif. sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahman Pina selaku Ketua AMPG sekaligus Ketua Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan :

*“....Jadi semua organisasi sayap itu diberikan kuota untuk merekomendasikan kadernya sebagai calon anggota legislatif, untuk AMPG sendiri kita akan merekomendasikan kader-kader potensial yang punya elektabilitas dan berpeluang terpilih menjadi anggota legislatif, sedangkan anggota AMPG yang lain akan menopang Saksi di tiap TPS tentunya.”<sup>45</sup>*

---

<sup>44</sup> Wawancara langsung dengan La Kama Wiyaka, Ketua Bappilu DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, di Sekretariat DPD I Partai Golkar Sulsel, Pada tanggal 20 Februari 2023.

<sup>45</sup> Wawancara Langsung dengan Rahman Pina, Ketua AMPG Sulawesi Selatan, di Cefe Mama Baumangga Makassar, pada tanggal 20 Februari 2023.

Melalui Musyawarah Nasional atau MUNAS X Partai Golkar tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Desember telah menghasilkan beberapa keputusan yang bersifat strategis, salah satunya membentuk Badan dan Lembaga yang bertujuan untuk memenangkan setiap kompetisi pemilu, baik Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden. Maka dibentuklah suatu Badan guna mengamankan hasil perolehan suara Partai Golkar, kader Partai Golkar, atau calon yang diusung Partai Golkar dalam pemilihan umum yaitu Badan Saksi Nasional Partai Golkar atau BSNPG. Berkaitan dengan penjelasan Rahman Pina, nantinya pengurus AMPG akan mengisi Badan Saksi Nasional Partai Golkar.

#### **b. Pengambilan Keputusan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan**

Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam pelaksanaannya menerapkan demokrasi di internal partai untuk senantiasa berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada dalam AD/ART Partai . Hal itu dilakukan untuk memberikan peluang kepada seluruh anggota dan pengurus untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan hanya dalam penerapan aturan-aturan dalam partai, tetapi juga berlaku dalam semua proses pengambilan kebijakan.

Partai Golkar Sulawesi Selatan sendiri lebih mengedepankan proses musyawarah dalam membuat aturan maupun dalam perumusan kebijakan tertentu. Menurut prosedur yang ada, bahwa beberapa kebijakan dapat ditentukan sendiri oleh pengurus DPD I, juga ada yang

harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari level yang lebih tinggi dalam hal ini DPP. Jika kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan tidak terlalu urgen dan strategis, Partai Golkar Sulawesi Selatan biasanya melakukan rapat pengurus, misalnya dalam menentukan panitia-panitia kegiatan partai. Untuk menjaga terjaminnya proses demokrasi dalam partai, senantiasa diupayakan melaksanakan rapat konsolidasi tiap bulan di Kantor DPD I.

Kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis dan urgen, misalnya dalam penentuan daftar calon legislatif, penentuan pimpinan fraksi di DPRD, serta Pergantian Antar Waktu (PAW) maupun dalam penentuan calon kepala daerah biasanya diputuskan melalui rapat pleno. Hasilnya kemudian diserahkan ke level yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. Sebagaimana yang di kemukakan Fahrudin Rangga selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sulsel III (Takalar, Gowa) sekaligus anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan :

*“...Jadi sistemnya itu begini, usulan (Calon Legislatif) dari partai, organisasi pendiri, dan organisasi sayap, mengusulkan nama ke Partai Golkar, lewat Bappilu atau badan-badan yang dibentuk untuk itu, kalau tingkatan Provinsi biasanya penentuan akhirnya atau konsultasinya itu di Pusat, kalau kabupaten kota itu konsultasinya di Provinsi.”<sup>46</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menilai bahwa pengambilan keputusan dalam internal Partai Golkar Sulawesi Selatan

---

<sup>46</sup> Wawancara langsung dengan Fahrudin Rangga, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan di Kantor DPDR Provinsi Sulawesi Selatan, Pada Tanggal 1 Maret 2023.

dalam kondisi-kondisi tertentu, diperlukan adanya masukan-masukan dan saran dari tokoh-tokoh partai dalam setiap perumusan kebijakan. Hal ini sudah tertuang dalam AD/ART Partai, sehingga dalam ketentuan tersebut struktur kepengurusan partai dilengkapi dengan Dewan Pertimbangan Partai. Meskipun bukan berarti Dewan Pertimbangan ini memiliki kekuatan utama dalam penentuan kebijakan, hanya terbatas untuk memberikan saran.

Pengambilan keputusan DPD I Partai Golkar Sulsel memiliki mekanisme yang normatif diatur oleh AD/ART. Kebijakan yang diambil disesuaikan dengan visi dan misi partai secara umum. Adapun dalam situasi pengajuan calon, yakni arahan, petunjuk, restu, atau bahkan dikatakan perintah dari DPP. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam situasi penting, seperti keputusan menjadi fusionaris memiliki pola hirarkis, yakni persetujuan, arahan, atau perintah dari struktur Partai Golkar yang di atasnya. Hal ini juga terlihat dalam keputusan yang diambil untuk pencalonan di bawah DPD I, seperti DPD II.

Kecenderungan intervensi dari DPP memang masih menggejala dalam setiap pengambilan kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, karena memang menurut prosedur yang berlaku dalam partai, beberapa kebijakan strategis yang dilakukan oleh DPD I harus dikonsultasikan atau dilaporkan ke level di atasnya untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. Seperti dalam penentuan daftar calon legislatif, Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin

Padjalangi diminta maju menjadi calon anggota DPR RI pada Pemilihan legislatif tahun 2024 mendatang. DPD I Golkar Sulawesi Selatan mengungkap kebijakan ini menjadi perintah DPP Partai Golkar. Walaupun pada hakekatnya hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh DPD I tinggal memperoleh persetujuan dan pengesahan, sepanjang mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam prosedur organisasi.

Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam pengambilan keputusan yang lebih menentukan bukan seorang pemimpin partai yang disegani atau faksi-faksi yang ada dalam partai tetapi yang lebih menentukan adalah partai secara keseluruhan dengan pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan dengan mengedepankan proses musyawarah dalam membuat aturan maupun dalam perumusan kebijakan.

### **c. Menghindari Konflik Internal Partai**

Hasil penelitian dengan beberapa wawancara yang telah dilakukan, bahwa dari segi keutuhan organisasi Partai Golkar Sulawesi Selatan relatif aman. Meskipun kadang muncul faksi-faksi di dalam partai, namun munculnya faksi tersebut tidak sampai mengganggu keutuhan organisasi. Seperti yang terjadi antara Ketua Umum dan Ketua Harian yaitu antara Taufan Pawe selaku Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan sekaligus Wali Kota Parepare dan Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan yaitu Kadir Halid.



Perkara ini berawal saat Ketua Harian DPD I Golkar Kadir Halid memimpin rapat pleno tanpa dihadiri oleh Ketua DPD I dan berujung dengan agenda mosi tak percaya kepada Taufan Pawe selaku Ketua DPD I, Kadir Halid menuding ada pelanggaran organisasi mengenai struktur kepengurusan periode 2020-2025. Setelah rapat tersebut, Taufan Pawe menganggap rapat tersebut tidak sah karena tidak dihadiri olehnya sebagai legitimasi utama dari pleno dan melanggar petunjuk pelaksanaan (Juklak) Partai Golkar.

Faksi yang muncul akibat kekecewaan terhadap kebijakan partai senantiasa ditanggapi sebagai bagian dari dinamika partai politik seperti yang dikutip dari wawancara dengan Andi Ina Kartika Sari selaku Bendahara DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan sekaligus Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan :

*“...saya kira itu bagian dari dinamika dalam berpartai, masalah ini sudah dibicarakan secara kekeluargaan, jadi saya kira tidak mengganggu persiapan kita dalam menghadapi pemilihan legislatif 2024 mendatang”*.<sup>47</sup>

Wawancara di atas mengisyaratkan bahwa mekanisme yang dilakukan untuk menghindari terjadinya faksi atau perpecahan dalam tubuh partai ke depan, Partai Golkar Sulawesi Selatan berupaya untuk meredam dengan melakukan konsolidasi internal partai. Partai Golkar melalui rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang dilaksanakan di

---

<sup>47</sup> Wawancara langsung dengan Andi Ina Kartika Sari, Bendahara Umum DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Pada Tanggal 1 Maret 2023.

Makassar menekankan pentingnya pelembagaan atau institusionalisasi partai dalam dimensi kesisteman hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam sambutannya bahwa langkah persiapan yang utama dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang adalah konsolidasi internal Partai Golkar untuk memperkuat pelembagaan atau institusionalisasi partai. Hal ini sejalan dengan perkataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung bahwa strategi Partai Golkar Memenangkan Pemilu 2024 yaitu dengan mengurangi konflik internal partai.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid juga mendorong adanya konsolidasi secara menyeluruh di tubuh DPD I Partai Golkar Sulsel. Menindaklanjuti instruksi Airlangga Hartarto, Partai Golkar Sulawesi Selatan dibawah komando Taufan Pawe telah menyelesaikan konsolidasi 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, sejauh ini 24 Kabupaten/Kota sudah menggelar musyawarah daerah memilih ketua baru definitif 7 diantaranya dipimpin oleh kepala daerah kader Golkar.

Pada dasarnya perpecahan sering terjadi karena kurangnya komunikasi dan koordinasi di antara pengurus, sehingga menimbulkan kesalah pahaman yang berujung pada kekecewaan pada sebagian anggota atau pengurus. Meskipun diakui oleh pengurus bahwa perpecahan yang ada dalam tubuh partai tidak sampai mengganggu keutuhan organisasi, namun jika itu terjadi maka ada mekanisme dan prosedur tertentu untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan AD/ART

partai.

Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam upaya penanganan konflik, juga senantiasa berpedoman pada mekanisme yang telah ditentukan oleh aturan partai dalam hal ini AD/ART Partai Golkar. Seperti yang diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa faksionalisme yang pernah terjadi di internal Partai Golkar Sulawesi Selatan selama ini tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan berhasil diselesaikan melalui konsolidasi internal partai sesuai dengan AD/ART. Faksi-faksi yang ada tidak sampai mengganggu keutuhan organisasi dalam artian kepengurusan tetap utuh dan tidak terjadi dualisme kepemimpinan yang dapat menyebabkan perpecahan dalam internal kepengurusan partai.

## **5.2. Dimensi Pengetahuan Publik (Reification)**

Dimensi pengetahuan publik berkaitan dengan upaya partai politik untuk mencitrakan dirinya sebaik mungkin di mata publik. Secara konseptual, partai politik yang mampu mencitrakan dirinya dengan baik di mata publik akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari publik. Sebaliknya, jika di mata publik partai tersebut memiliki citra yang tidak diinginkan oleh publik, maka kecenderungan untuk ditinggalkan oleh publik juga akan tinggi. Pada kenyataannya saat ini kita dapat menyaksikan bagaimana partai-partai politik yang ada, terus berupaya untuk tampil sebagai partai yang berjuang untuk kepentingan masyarakat. Upaya pencitraan yang dilakukan oleh partai politik dapat dilakukan melalui proses-proses politik maupun penggunaan simbol-simbol partai di

masyarakat. Partai Golkar sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024 harus mampu mencitrakan dirinya dengan baik di mata publik guna mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

#### **a. Penguatan Pada Citra Politik**

Penguatan citra politik DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan di masyarakat adalah sesuatu yang penting. Hal ini bertujuan untuk menanamkan pengetahuan publik terhadap eksistensinya di masyarakat. Penguatan citra partai di masyarakat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan partai secara kelembagaan maupun personal kader partai. Kegiatan-kegiatan dimaksud dapat berupa program-program partai maupun pengenalan simbol-simbol partai kepada masyarakat mengenai keberadaan partai. Pelaksanaan program partai dan penggunaan simbol-simbol ini bertujuan untuk menanamkan nilai dan platform partai, sehingga keberadaan partai tersebut dapat dipahami dan tertanam dalam imajinasi publik. Adapun program yang dilaksanakan oleh DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk memperkuat citranya di Masyarakat antara lain:

##### **1. Yellow Clinic**

Sejak tahun 2019 Partai Golkar Sulsel secara kelembagaan melaksanakan kegiatan sosial, kemanusiaan, serta keagamaan di masyarakat. Pada awal-awal Pandemi Covid-19, Partai Golkar meluncurkan program *Yellow Clinic*. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengintruksikan

seluruh kader Golkar untuk terus bergerak dan turun langsung dalam penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional agar lebih dekat dengan masyarakat.

Partai Golkar Sulawesi Selatan merespon intruksi dari Ketua Umum Partai dengan meluncurkan *Yellow Clinic* yang diresmikan bersamaan dengan pelantikan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan sebagaimana yang disampaikan oleh Bendahara Umum DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan sekaligus Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Ina Kartika Sari :

*“... Yellow Clinic ini bukan sekedar klinik biasa, klinik ini bersifat pratama yang artinya mulai dokter dan perawatnya itu jelas dan bisa bekerja sama dengan BPJS, sehingga klinik ini memang serius melayani masyarakat”.*<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menilai bahwa program Yellow Clinic ini merupakan salah satu langkah dari Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk mencitrakan dirinya sebagai partai yang peduli terhadap kondisi kesehatan masyarakat di tengah pandemi, dan ikut serta dalam penanggulangan covid-19. Salah satu program bakti sosial yang di gaungkan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan bersama Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) adalah program vaksinasi bagi masyarakat umum hingga lansia. Melalui Yellow Clinic, DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan melakukan kegiatan seruan vaksinasi, selain itu Yellow Clinic juga melayani konsultasi dan edukasi kesehatan langsung,

---

<sup>48</sup> Wawancara langsung dengan Andi Ina Kartika Sari, Bendahara Umum DPD I Partai Golkar Sulsel, di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Pada Tanggal 1 Maret 2023.

pemeriksaan kesehatan dan laboratorium seperti tensi, gula darah, dan asam urat, serta rapid tes antigen, semuanya itu gratis tanpa dipungut biaya seperpun.

## **2. Golkar Milenial (Go M)**

Program Partai Golkar selanjutnya adalah Golkar Milenial, program ini merupakan bagian dari penguatan citra Partai Golkar dikalangan generasi muda. Partai Golkar memiliki strategi khusus untuk meraih suara anak muda di Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. seperti yang dikutip dari wawancara dengan Abbas Hady, selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi :

*“...Ada gagasan saya itu sejak saya PLT Ketua DPD Golkar Palopo, waktu itu saya luncurkan disana gagasan untuk membentuk Go M (Golkar Milenial), sekmennya ini khusus kelompok milenial dan ada kategorinya disitu, ada Go M Arts, Go M Sports, Go M Entrepreneurs, Go M Leaders.”<sup>49</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menilai bahwa strategi Partai Golkar untuk menarik minat milenial bergabung kedalam Partai Politik yaitu dengan dibukakan proses rekrutmen melalui jalur minat dan bakat untuk menyalurkan minat dan bakat mereka sebab tidak semua milenial tertarik dengan aktifitas-aktifitas partai yang hanya berkaitan dengan politik. Sehingga dibentuklah Golkar Milenial yang terdiri dari beberapa kategori.

---

<sup>49</sup> Wawancara langsung dengan Abbas Hady, Ketua Bidang Kaderisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, di Rumah Pribadi Narasumber, Pada tanggal 12 Februari 2023.

Abbas Hady menjelaskan Go M Sports maupun Go M Arts sedapat mungkin dalam proses pembinaannya setelah rekrutmen akan dibina untuk menjadi seniman profesional maupun olahragawan profesional untuk itu Partai Golkar akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang berorientasi dibidang tersebut. Go M Entrepreneurs diarahkan menjadi kader fungsional pengusaha bagi mereka yang suka berwirausaha, dalam proses pembinaannya bisa diikuti dalam organisasi yang bergerak di bidang kewirausahaan seperti HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan lain sebagainya.

Go M Leaders memang dirancang untuk menjadi seorang organisatoris dan politisi sekaligus, jadi tidak semata-mata menjadi aktivis seperti dikampus, biasanya mahasiswa atau aktivis kampus dikatakan organisatoris karena memang aktif di organisasi-organisasi kampus baik di ekstra maupun di intra tapi sebetulnya mereka perspektif politiknya atau keterampilan berpolitiknya ala organisasi mahasiswa, sementara di Partai Golkar mereka akan dibina menjadi seorang organisatoris dan politisi sekaligus, sebab biasanya ada orang organisatoris tapi bukan politisi, ada juga orang politisi tapi pemahaman organisasinya kurang, sementara di Partai Golkar akan memadukan keduanya, jadi Go M Leads ini murni politik.

Kaum milenial atau pemilih pemula menjadi target penting sebab survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi

kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024 mendatang. Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usianya antara 17-37 tahun. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, data dari KPU jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 - 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35%-40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa.

Data dari KPU menunjukkan komposisi pemilih dalam pemilu 2024 akan didominasi oleh kelompok usia muda. Jumlah kelompok ini disebut mencapai 60 persen dari total pemilik suara sah. Berdasarkan data DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari pemerintah proporsi pemilih 2024 tanggal 14 februari nanti mencapai usia 17-39 tahun itu 55 sampai 60 persen.

Dalam data kependudukan per semester 1 tahun 2022 yang sudah diverifikasi Kemendagri, total terdapat 204 juta penduduk potensial pemilih pada Pemilu 2024 nanti. Penduduk yang masuk dalam DP4 adalah WNI yang akan berusia 17 tahun atau lebih pada hari H Pemilu 2024 dan bukan anggota TNI/Polri. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 telah mencapai 81 persen dan tidak menutup kemungkinan pada pemilu 2024 akan semakin bertambah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih



Berkelanjutan Periode April Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa 10 Mei 2022 di Aula Kantor KPU Sulawesi Selatan. Adapun Total Pemilih untuk bulan April sebanyak 6.125.630 Pemilih, sedangkan untuk Total Pemilih di Bulan Maret sebanyak 6.125.528 Pemilih, ada penambahan jumlah pemilih sebanyak 102 Pemilih, sedangkan jumlah pemilih muda atau pemilih milenial dengan rentang usianya antara 17-40 tahun sebanyak 3.082.182 atau 50% lebih dari total jumlah pemilih di Sulawesi Selatan.

### **3. Golkar Institute**

Program Partai Golkar selanjutnya adalah Golkar Institute, program ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik. Golkar Institute lahir atas rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) X Partai GOLKAR tahun 2019, dalam rangka penguatan kapasitas kader, maka didirikanlah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan yang dinamakan Golkar Institute. Secara legal Golkar Institute terbentuk pada tanggal 8 September 2020 dengan nama Yayasan Golkar Institut Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik (SPKP).

Golkar Institute adalah Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik pertama yang didirikan oleh sebuah partai politik di Indonesia dan secara inklusif terbuka untuk umum. Tujuannya untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang memiliki karakter dan kompetensi dalam menjadi pemangku kebijakan di Indonesia. Program-program spesial yang dijalankan antara lain kursus singkat, workshop, maupun webinar. Golkar

Institute mempersiapkan dan mencetak calon-calon pemimpin terbaik Indonesia dengan memiliki 3 pilar kemampuan yaitu politik, ekonomi dan kepemimpinan transformatif. Memiliki integritas, berdaya saing, etos kerja yang tinggi, berwawasan global, dan inovatif dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Golkar Institute memiliki proses rekrutmen dan kaderisasi yang terbuka untuk umum bagi siapa saja yang ingin belajar tentang politik, sebagaimana yang dikatakan oleh Abbas Hady selaku Wakil Ketua Bidang Kaderisasi :

*“...Golkar Institute merupakan bagian dari proses rekrutmen dan kaderisasi, generasi milenial yang bergabung ke Partai Golkar lewat Go M Leaders tadi akan kita bina di Golkar Institute, tapi selain kader juga bisa ikut Golkar Institute karena terbuka untuk umum”<sup>50</sup>.*

Wawancara diatas menunjukkan bahwa Golkar Institute merupakan bagian dari proses rekrutmen untuk melahirkan kader-kader terbaik dalam menghadapi pemilihan umum yang bisa di ikutkan dalam kontestasi politik, baik sebagai calon legislatif maupun eksekutif. Selama 58 tahun berdiri, Partai Golkar mampu menunjukkan eksistensinya melalui berbagai transformasi, antara lain memberikan peluang dan kepercayaan bagi kader muda partai untuk berkiprah, peran milenial Partai Golkar dianggap dapat membangun elektabilitas partai.

---

<sup>50</sup> Wawancara langsung dengan Abbas Hady, Ketua Bidang Kaderisasi DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, di Rumah Pribadi Narasumber, Pada tanggal 12 Februari 2023.

## **b. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Golkar Sulawesi Selatan**

Kepercayaan masyarakat terhadap suatu partai dapat dilihat dari seberapa banyak kader partai tersebut yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan disuatu daerah. Sebagai salah satu partai tertua di Indonesia, Partai Golkar sangat matang dalam politik lokal. Partai Golkar sangat kaya dengan potensi kader disetiap daerah, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada periode 2019-2024, Partai Golkar mampu menempatkan 7 kadernya sebagai Kepala Daerah dan 3 Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini :

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
<b>1</b>	Muhammad Basli Ali	Bupati Selayar
<b>2</b>	Yahonis Bassang	Bupati Toraja Utara
<b>3</b>	Andi Kaswadi Razak	Bupati Soppeng
<b>4</b>	Iksan Iskandar	Bupati Jeneponto
<b>5</b>	Andi Fahsar M Padjalangi	Bupati Bone
<b>6</b>	Muslimin Bando	Bupati Enrekang
<b>7</b>	Indah Putri Indriani	Bupati Luwu Utara
<b>8</b>	Andi Pangeran Rahim	Wakil Wali Kota Parepare
<b>9</b>	Suhartina Bohari	Wakil Bupati Maros
<b>10</b>	Akbar Andi Leluasa	Wakil Bupati Luwu Timur

Pada Periode yang sama, Partai Golkar menjadi partai pemenang pemilu di Sulawesi Selatan, hal itu bisa dibuktikan dengan menempatkan kadernya sebanyak 13 orang di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengamankan posisi Ketua DPDR Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Andi Ina Kartika Sari	Ketua DPRD Sulsel
2	Rahman Pina	Ketua Komisi E
3	John Rende Mangotan	Wakil Ketua I Komisi D
4	Arfiandy Idris	Wakil Ketua II Komisi A
5	Andie Debbie Purnama	Anggota Komisi A
6	Suwardi Haseng	Anggota Komisi B
7	Zulkifli Zain	Anggota Komisi B
8	Andi Hatta Marakarma	Anggota Komisi C
9	Fahrudin Rangga	Anggota Komisi C
10	Sofyan Syam	Anggota Komisi D
11	Taqwa Muller	Anggota Komisi D
12	Ayu Andira	Anggota Komisi E
13	Izman M. Padjalangi	Anggota Komisi E

*Sumber: DPRD Sulawesi Selatan, 2023.*

Kekuatan Partai Golkar di Sulawesi Selatan bersumber dari identitas yang dimilikinya antara lain adalah ideologi partai serta kekuatan pada tokoh partai dan kadernya.<sup>51</sup> Ideologi partai merupakan identitas atau karakteristik yang kuat bagi partai politik, Adanya identitas ideologi, memungkinkan semua orang terutama para pemilih yang berhak memberikan suara dapat dengan mudah membedakannya dengan partai politik lain. Partai Golkar mengemban karakter nasionalis, yaitu ideologi yang sangat sesuai di negara pluralis seperti Indonesia. Dalam Negara pluralis terdapat banyak golongan, suku, ras, budaya serta kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Dalam kondisi ini, maka dibutuhkan suatu partai yang dapat menyatukan kelompok dan golongan yang berbeda ini. Ideologi dan platform Partai Golkar yang dapat menerima kelompok dan golongan manapun menjadi salah satu faktor Golkar tetap kuat ditengah maraknya berbagai macam partai baru yang bermunculan.

Identitas yang melekat di Partai Golkar ini pun juga menjadi dasar yang kuat di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, partai Golkar memiliki kemampuan dalam merangkul semua kalangan yang ada dalam masyarakat, baik dari suku yang berbeda maupun dari agama yang berbeda. Selain itu, partai Golkar di Sulawesi Selatan memiliki pemilih klasik atau pemilih yang masih setia dengan Partai Golkar sejak rezim Orde Baru, sehingga sampai saat ini Partai Golkar masih menjadi partai kuat dan populer di Sulawesi Selatan. Ideologi dan platform Partai Golkar

---

<sup>51</sup> Gustiana A. Kambo, "Kekuatan Partai Golkar di Toraja Utara", Kritis : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 2 No. 2 Desember 2016.

yang menerima semua golongan yang ada dalam masyarakat adalah salah satu kekuatan Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Banyak masyarakat yang setia kepada Partai Golkar karena telah merasakan ketentraman pada kepemimpinan Partai Golkar di masa Orde Baru.

Identitas tokoh atau Ketokohan merupakan salah satu kekuatan internal yang sangat penting. Hal ini memberikan kemanfaatan partai dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Partai Golkar yang merupakan Partai pemenang pemilu di Sulawesi Selatan dan memiliki kemampuan dalam mendudukkan kader kadernya di eksekutif dan legislatif, keberadaan kader-kader Partai Golkar di eksekutif dan legislatif memudahkan calon yang diusung Partai Golkar untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya orang yang duduk atau menjabat dalam satu pemerintahan memiliki pengaruh di wilayah atau daerah Kader-kader inilah yang bekerja secara optimal dalam memenangkan Partai Golkar di Sulawesi Selatan.

Pada Pemilu tahun 2024 yang akan datang, dengan berbagai macam persiapan yang diungkapkan sebelumnya, Partai Golkar menargetkan 18 kursi di DPRD Provinsi atau minimal mampu mempertahankan posisi Ketua DPRD Sulsel, dan 200 di Kabupaten/Kota di seluruh Sulsel, sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Ina Kartika Sari Sebagai Ketua DPRD Sulsal dan Bendahara Umum DPD I Partai Golkar Sulsel :

*“...Target kita pada pemilu 2024 adalah 18 kursi di DPRD Provinsi seperti pada 2 periode sebelumnya atau minimal mampu*

*mempertahankan posisi Ketua DPRD Provinsi, kalau DPRD kabupaten kota, kita sekarang mendapatkan kursi 152. Saya percaya tembus angka 200 kursi di 2024. Ini berbanding lurus dengan memenangkan Bapak Airlangga sebagai calon presiden.”<sup>52</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas pernyataan Andi Ina Kartika Sari tersebut terkesan optimistik dan penuh percaya diri. Hal ini sekali lagi kembali kepada tujuan utama pemenangan 2024 untuk dapat meloloskan Parliamentary Threshold dan dapat mencalonkan Airlangga Hartanto sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang.

### **5.3. Implikasi teoritik**

Tulisan ini mencoba memahami bagaimana persiapan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024, dengan melihat bagaimana institusionalisasi Partai Golkar Sulawesi Selatan pada dimensi kesisteman dan pengetahuan publiknya.

Menurut Vicky Randall dan Svasand dimensi kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. Dimensi kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (c)

---

<sup>52</sup> Wawancara langsung dengan Andi Ina Kartika Sari, Bendahara Umum DPD I Partai Golkar Sulsel, di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Pada Tanggal 1 Maret 2023.

bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART).

Dimensi pengetahuan publik berkaitan dengan upaya partai politik untuk mencitrakan dirinya sebaik mungkin di mata publik. Secara konseptual, partai politik yang mampu mencitrakan dirinya dengan baik di mata publik akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari publik. Upaya pencitraan yang dilakukan oleh partai politik dapat dilakukan melalui proses-proses politik maupun penggunaan simbol-simbol partai di masyarakat. Partai Golkar sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2024 harus mampu mencitrakan dirinya dengan baik di mata publik guna mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

Berdasarkan atas kajian dan pemikiran tersebut, tulisan ini memperlihatkan hasil penelitian yang membawa pada implikasi pada teori yang digunakan dalam analisis datanya, yaitu:

Implikasi pertama, dari segi dimensi kesisteman, dalam kaitan dengan persiapan menghadapi Pemilu 2024, Partai Golkar memperkuat kaderisasi. Terkait dengan standar rekrutmen anggota dan pengurus di internal Partai Golkar, secara prosedural telah diatur dalam AD/ART partai. Selain sistem rekrutmen dan kaderisasi, Partai Golkar sebagai sebuah partai yang telah lama berkiprah, memiliki organisasi-organisasi internal yang cukup banyak sebagai bagian integral partai. Dalam tubuh Partai Golkar dikenal adanya organisasi-organisasi baik yang dibentuk



oleh partai maupun organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada Partai Golkar. Partai Golkar menggunakan kader dan keseluruhan anggota organisasi pendiri atau Hasta Karya dan organisasi yang didirikan untuk membantu kemenangan Pemilu tahun 2024 mendatang melalui pembentukan kelembagaan partai secara struktural.

Menurut Vicky Randall dan Svasand dimensi kesisteman berbicara tentang pelaksanaan fungsi-fungsi partai. salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik, dalam hal ini, Partai Golkar Sulawesi Selatan memaksimalkan fungsi rekrutmen dengan memperkuat kaderisasi dalam menghadapi pemilihan legislatif untuk membantu kemenangan pemilu tahun 2024.

Partai Golkar Sulawesi Selatan dari segi pengambilan keputusannya, lebih mengedepankan proses musyawarah dalam membuat aturan maupun dalam perumusan kebijakan tertentu dengan berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada dalam AD/ART Partai. Hal itu dilakukan untuk memberikan peluang kepada seluruh anggota dan pengurus untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan hanya dalam penerapan aturan-aturan dalam partai, tetapi juga berlaku dalam semua proses pengambilan kebijakan.

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga kelemahan utama partai politik di Indonesia, salah satunya adalah secara internal partai kurang dikelola secara demokratis. oleh karena itu Partai Golkar Sulawesi selatan dalam pengambilan keputusan lebih

mengedepankan proses musyawarah. Menurut Guelermo O'Donnel, peraturan yang hadir di dalam partai politik, secara tidak langsung mampu memberikan proteksi dan perlindungan terhadap kedaulatan partai dari berbagai macam kepentingan segelintir elit atau golongan tertentu yang bakal berujung pada terabaikannya kepentingan anggota dan institusi partai. Pelibatan ini bertujuan agar sebuah keputusan yang akan dikeluarkan dapat memiliki unsur legitimasi yang kuat di kalangan internal Partai Golkar Sulawesi Selatan, sehingga keputusan yang telah hadir mampu menghadirkan behavioral routinization di internal partai politik, dimana terdapat pola organisasi yang stabil dengan ditunjang oleh aturan dan norma dalam pola aktivitas organisasi.

Partai Golkar memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisannya dengan menghindari konflik internal partai. berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa wawancara yang telah dilakukan, bahwa dari segi keutuhan organisasi Partai Golkar Sulawesi Selatan relatif aman. Meskipun kadang muncul faksi-faksi di dalam partai, namun munculnya faksi tersebut tidak sampai mengganggu keutuhan organisasi. Seperti yang terjadi antara Ketua Umum dan Ketua Harian yaitu antara Taufan Pawe selaku Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan sekaligus Wali Kota Parepare dan Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan yaitu Kadir Halid.

Perkara ini berawal saat Ketua Harian DPD I Golkar Kadir Halid memimpin rapat pleno tanpa dihadiri oleh Ketua DPD I dan berujung

dengan agenda mosi tak percaya kepada Taufan Pawe selaku Ketua DPD I, Kadir Halid menuding ada pelanggaran organisasi mengenai struktur kepengurusan periode 2020-2025. Setelah rapat tersebut, Taufan Pawe menganggap rapat tersebut tidak sah karena tidak dihadiri olehnya sebagai legitimasi utama dari pleno dan melanggar petunjuk pelaksanaan (Juklak) Partai Golkar.

Dimensi kesisteman menurut Vicky Randall termasuk proses penyelesaian konflik sesuai dengan aturan atau AD/ART Partai. Partai Golkar Sulawesi Selatan berusaha menyelesaikan konflik internal partai sesuai dengan AD/ART Partai. selain itu Guillermo O'donnel menyebutkan bahwa partai politik sulit menjadi aktor politik yang solid akibat terjadinya disfungsi faksionalisme, dimana adanya perbedaan kepentingan yang mendasari pelaksanaan sebuah keputusan. Mekanisme yang dilakukan untuk menghindari terjadinya faksi atau perpecahan dalam tubuh partai ke depan, Partai Golkar Sulawesi Selatan berupaya untuk meredam dengan melakukan konsolidasi internal partai.

Partai Golkar melalui rapat koordinasi nasional (Rakornas) yang dilaksanakan di Makassar menekankan pentingnya pelebagaan atau institusionalisasi partai dalam dimensi kesisteman hal itu disampaikan langsung oleh ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam sambutannya bahwa langkah persiapan yang utama dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang adalah konsolidasi internal Partai Golkar untuk memperkuat pelebagaan atau institusionalisasi partai. Hal ini

sejalan dengan perkataan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Nurdin Halid yang mendorong adanya konsolidasi secara menyeluruh di tubuh DPD I Partai Golkar Sulsel, terlebih pemilu 2024 sudah di depan mata, dimana partai politik lain sudah bergerak dan bermanuver untuk merebut posisi Partai Golkar melihat ketatnya peta persaingan politik di Sulawesi Selatan.

Partai Golkar Sulawesi Selatan dibawah komando Taufan Pawe telah menyelesaikan konsolidasi 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, sejauh ini 24 Kabupaten/Kota sudah menggelar musyawarah daerah memilih ketua baru definitif, 7 diantaranya dipimpin oleh kepala daerah kader Golkar. Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Taufan Pawe menargetkan Partai Golkar kembali menjadi pemenang pemilu di Sulawesi Selatan.

Implikasi Kedua, dari segi dimensi pengetahuan publik, Partai Golkar Sulawesi Selatan memperkuat citra politiknya di masyarakat melalui program-program partai. Adapun program yang dilaksanakan oleh DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk memperkuat citranya di Masyarakat antara lain: Yellow Clinic, program ini merupakan salah satu langkah dari Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk mencitrakan dirinya sebagai partai yang peduli terhadap kondisi kesehatan masyarakat di tengah pandemi, dan ikut serta dalam penanggulangan covid-19.

Salah satu program bakti sosial yang di gaungkan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan bersama Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) adalah program vaksinasi bagi masyarakat umum hingga lansia.

Melalui Yellow Clinic, DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan melakukan kegiatan seruan vaksinasi, selain itu Yellow Clinic juga melayani konsultasi dan edukasi kesehatan langsung, pemeriksaan kesehatan dan laboratorium seperti tensi, gula darah, dan asam urat, serta rapid tes antigen, semuanya itu gratis tanpa dipungut biaya seperpun.

Program Partai Golkar selanjutnya adalah Golkar Institute dan Golkar Milenial, program ini merupakan bagian dari penguatan citra Partai Golkar dikalangan generasi muda. Selain itu Golkar institute juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi partai sebagai sarana pendidikan politik. Golkar Institute lahir atas rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) X Partai GOLKAR tahun 2019, dalam rangka penguatan kapasitas kader, maka didirikanlah sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan yang dinamakan Golkar Institute. Secara legal Golkar Institute terbentuk pada tanggal 8 September 2020 dengan nama Yayasan Golkar Institut Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik (SPKP).

Partai Golkar Sulawesi Selatan mempunyai tingkat kepercayaan di Masyarakat yang sangat bagus, kepercayaan politik suatu partai dapat dilihat dari seberapa banyak kader partai tersebut yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan disuatu daerah. Sebagai salah satu partai tertua di Indonesia, Partai Golkar sangat matang dalam politik lokal. Partai Golkar sangat kaya dengan potensi kader disetiap daerah, terutama di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada periode 2019-2024, Partai Golkar mampu menempatkan 7 kadernya sebagai Kepala Daerah dan 3 Wakil

Kepala Daerah. Pada Periode yang sama, Partai Golkar menjadi partai pemenang pemilu di Sulawesi Selatan, hal itu bisa dibuktikan dengan menempatkan kadernya sebanyak 13 orang di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengamankan posisi Ketua DPDR Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Partai politik secara inheren memiliki misi kekuasaan politik dengan berusaha semaksimal mungkin dapat menempatkan kadernya di semua lini pemerintahan, baik di kekuasaan eksekutif maupun legislatif, tidak terkecuali Partai Golkar. DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Taufan Pawe menargetkan Partai Golkar meraih kemenangan di Sulawesi Selatan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Untuk mencapai tujuan itu tentu dibutuhkan persiapan yang matang salah satunya dari segi pelembagaan atau institusionalisasi partai, sebab partai politik dituntut untuk senantiasa menjaga dan memelihara stabilitas organisasinya, melalui pembenahan secara internal maupun eksternal. Dengan kondisi ini, sistem pelembagaan partai politik yang mapan menjadi penting dalam upaya untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu, ketika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu

tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik. DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan melakukan upaya persiapan menghadapi pemilu tahun 2024 dari segi institusionalisasi partai yang dapat dilihat melalui dua dimensi sebagai berikut:

#### 1. Dimensi Kesisteman

DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan melakukan persiapan dalam menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024 dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik sesuai aturan-aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. Dalam kaitan dengan persiapan menghadapi pemilihan legislatif tahun 2024, Partai Golkar memperkuat kaderisasi. Partai Golkar menggunakan kader dan keseluruhan anggota organisasi pendiri atau Hasta Karya dan organisasi yang didirikan untuk membantu kemenangan Pemilu tahun 2024 mendatang melalui pembentukan kelembagaan partai secara struktural.

Partai Golkar memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisannya dengan menghindari konflik internal partai. Untuk menghindari konflik internal, Partai Golkar Sulawesi Selatan dari segi pengambilan keputusannya, lebih mengedepankan proses musyawarah dalam membuat aturan maupun dalam perumusan kebijakan tertentu dengan berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada dalam AD/ART

Partai. Partai Golkar memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisannya dengan menghindari konflik internal partai, meskipun kadang muncul faksi-faksi di dalam partai, namun munculnya faksi tersebut tidak sampai mengganggu keutuhan organisasi. Untuk menghindari terjadinya faksi atau perpecahan dalam tubuh partai ke depan, Partai Golkar Sulawesi Selatan berupaya untuk meredam dengan melakukan konsolidasi internal partai.

## 2. Dimensi Pengetahuan Publik

Dimensi pengetahuan publik berkaitan dengan upaya partai politik untuk mencitrakan dirinya sebaik mungkin di mata publik. Partai Golkar Sulawesi Selatan memperkuat citra politiknya di masyarakat melalui program-program partai. Adapun program yang dilaksanakan oleh DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk memperkuat citranya di Masyarakat adalah Yellow Clinic, program ini merupakan salah satu langkah dari Partai Golkar Sulawesi Selatan untuk mencitrakan dirinya sebagai partai yang peduli terhadap kondisi kesehatan masyarakat di tengah pandemi, dan ikut serta dalam penanggulangan covid-19. Program Partai Golkar selanjutnya adalah Golkar Institute dan Golkar Milenial program ini merupakan bagian dari penguatan citra Partai Golkar dikalangan generasi muda.

## 6.2. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan setelah melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut :



1. Partai politik harus memperhatikan pelembagaan atau institusionalisasi partainya baik dari segi dimensi kesisteman maupun pengetahuan publik, sebab sistem pelembagaan partai politik yang mapan menjadi penting dalam upaya untuk memenangkan kompetisi dalam pemilu.
2. Partai politik yang sedang bersiap menghadapi pemilihan umum hendaknya memperhatikan sistem rekrutmen dan kaderisasi partainya.
3. Pengambilan keputusan dalam partai politik harus dilakukan secara demokratis dengan mengedepankan proses musyawarah dan senantiasa berpedoman pada mekanisme prosedur yang ada dalam AD/ART Partai.
4. Konflik internal dalam sebuah partai politik merupakan suatu keniscayaan, namun sebisa mungkin partai politik menghindari konflik yang dapat mengganggu solidaritas dan keutuhan organisasi dalam menghadapi pemilihan umum.
5. Partai politik harus mampu mencitrakan dirinya dengan baik di tengah masyarakat untuk menanamkan pengetahuan publik terhadap eksistensi partainya.
6. penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih perlu ditingkatkan. Dikarenakan keterbatasan peneliti, penelitian ini hanya melihat pada dua dimensi pelembagaan partai politik. Untuk